

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 22										TAHUN 2006	

Menperin: Impor Tabung Elpiji Keterlaluan

JAKARTA— Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris khawatir rencana impor tabung elpiji dari Cina oleh Pertamina disusupi kepentingan oknum tertentu yang mencari keuntungan. Fahmi menyebut rencana itu sebagai tindakan yang keterlaluan.

"Itu keterlaluan. Saya khawatir impor itu ada komisinya. Masih banyak pejabat kita yang belum pro pada produk dalam negeri," ujar Fahmi Idris di sela pembukaan Pameran Produk Ekspor (PPE) 2006 di Jakarta, Rabu (11/10).

Menurut Fahmi, pihaknya

memprotes keras rencana tersebut, karena produsen elpiji di dalam negeri masih mampu memenuhi permintaan tabung elpiji yang diperlukan dalam rangka konversi minyak tanah ke gas. "Saya protes keras jika masih ada impor tabung gas. Ternyata banyak pejabat kita yang tidak pro bisnis, tidak pro produksi dalam negeri," tandasnya.

Menperin mengemukakan, tindakan impor bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, pihaknya akan meng-

agendakan pembicaran dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan jajaran Pertamina.

"Saya optimistis kapasitas produksi pabrikan tabung gas di dalam negeri masih bisa memenuhi permintaan Pertamina," ucapnya.

Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Deperin Ansari Bukhari, 14 produsen tabung gas domestik telah berinvestasi untuk memenuhi pesanan Pertamina sebanyak 800 ribu unit, asalkan waktu pembuatannya diperpanjang sampai Maret 2007. (dry)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA			<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																											
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 22										TAHUN 2006																				

7 Perusahaan Rusia Jajaki Investasi

JAKARTA-Sebanyak tujuh perusahaan manufaktur Rusia menjajaki investasi di Indonesia. Mereka meminati sektor agroindustri, farmasi, infrastruktur, jasa pengeboran minyak dan gas (migas), serta perbankan. Perusahaan-perusahaan itu meliputi JSC Nenets Oil Company, Gossneft Technology, Firn-M, Agro Market Trade Ltd, Racus, dan Electrostander Pribor.

Deputy General Director JSC Nenets Oil Company Victor I Tarusin mengatakan, delegasi perusahaan-perusahaan Rusia itu berminat menanamkan modalnya di Indonesia guna menerapkan

teknologi terbaru, khususnya di bidang jasa pengeboran migas. Kunjungan perusahaan-perusahaan Rusia ini merupakan misi investasi dan perdagangan negeri tersebut ke Indonesia.

"Khusus untuk JSC, kami ingin menerapkan teknologi pengembangan industri migas di Indonesia. Kami akan presentasi ke Pertamina. Jika dapat konfirmasi bahwa teknologi Rusia dapat diterapkan di Indonesia, kami segera merealisasikan investasi di sini," kata Victor Tarusin usai bertemu Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris, di Jakarta, Rabu (11/10).

Dia menjelaskan, JSC juga me-

rupakan badan usaha milik negara (BUMN) Rusia, seperti Pertamina. Itu sebabnya, perusahaan tersebut berminat menjalin kerja sama melalui pemerintah kedua negara (*government to government/G to G*). "Ini merupakan tahap awal kerja sama kedua perusahaan," tuturnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian (Deperin) Ansari Bukhari mengungkapkan, teknologi perusahaan Rusia bisa bermanfaat bagi pengembangan industri di Indonesia, terutama teknologi eksplorasi migas. (dry)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006



STOK BBM -
Seorang petugas mengamati truk tanki yang antri mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Plumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (11/10). PT Pertamina menyatakan kesiapannya melakukan operasi pasar jika permintaan BBM meningkat menjelang lebaran tahun ini. Saat ini stok BBM masih cukup.

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA				<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7										TAHUN 2006																				

Mendesak, Kebutuhan Gas untuk Dalam Negeri

JAKARTA- Kepala Pusat Kebijakan Keenergian Institut Teknologi Bandung Ucoc WR Siagian menilai pembangunan pipanisasi gas Kalimantan Timur-Jawa Tengah perlu segera dibangun. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas di Jawa yang terus meningkat. "Memang sudah *urgent* karena tren BBM akan terus naik, sedangkan gas di sekitar Jawa sudah tidak cukup," jelasnya di Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut dia, perkembangan kebutuhan gas dalam negeri terutama di Jawa terus meningkat. Tahun lalu, diperkirakan permintaan gas di Jawa mencapai 2.406 juta kaki kubik per hari (*million standard cubic feet per day/mmscfd*), padahal pasokan hanya 973 mmscfd. Artinya, terjadi defisit sekitar 1.433 mmscfd.

Menurut dia, di masa mendatang kalau gas Kaltim habis, masih ada batu bara yang bisa dikonversi menjadi gas, dan bisa dikirim ke Jawa. "Namun, uang yang haknya Pemda Kaltim harus tetap diperhatikan atau dipenuhi," katanya.

Serap Tenaga Kerja

Sementara itu, Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Benny Wahyudi mengatakan pemanfaatan produksi gas di dalam negeri akan memberi nilai tambah sebesar 20 kali lipat dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini akibat tumbuhnya industri di berbagai daerah, terutama yang dekat dengan sumber gas tersebut.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian yang tertuang dalam *Master Plan* (rencana besar) Kebutuhan Industri untuk Sektor Industri disebutkan bahwa tenaga kerja langsung yang diserap produksi LNG untuk satu train yang setara dengan 250 mmscfd hanya 250 orang atau setara dengan satu orang per mmscfd. Sedangkan bila gas dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri terutama amonia, urea, dan metanol, maka akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Disebutkan bahwa untuk memproduksi amonia sebesar 1.000 ton per hari dengan kebutuhan gas setara 35 mmscfd mampu mempekerjakan 300 orang atau setara 8,6 orang per mmscfd. Sama dengan amonia, produksi metanol 3000 ton per hari dengan kebutuhan gas setara 35 mmscfd mampu mempekerjakan 300 orang atau setara dengan 8,6 orang per mmscfd.

Penyerapan tenaga kerja di industri pupuk urea, lebih besar yakni yang dengan produksi sebesar 1.750 ton per hari, kebutuhan gasnya setara 25 mmscfd, mampu menyerap 500 orang atau setara dengan 20 orang per mmscfd.

Bila gas diubah menjadi LNG, hanya dihargai sekitar US\$ 2,4 per mmbtu, harga ammonia bisa mencapai US\$ 350 atau setara dengan US\$ 9,14 per mmbtu. Sedangkan harga urea dan metanol masing-masing setara dengan US\$ 7,18 dan US\$ 8,53 per mmbtu dengan asumsi harga urea US\$ 250 dan metanol US\$ 290 per ton.

Namun, ia juga memahami untuk menggairahkan para investor berminat mengeksplorasi cadangan gas yang ada, harga gas di dalam negeri juga jangan terlalu rendah sehingga produsen gas juga mau memasok ke dalam negeri.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mendukung penggunaan gas untuk dalam negeri karena akan menyebabkan efek berantai yang lebih besar baik pembukaan lapangan kerja baru maupun penyerapan tenaga kerja. (ed/es)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2006																			

Exxon Tunggu Persetujuan Anggaran dari BP Migas

SURABAYA- Exxon Mobil Indonesia masih menunggu persetujuan *budget* (anggaran) dari Bp Migas, untuk melanjutkan program pengembangan Blok Cepu. Beberapa rencana kerja terpaksa tertunda karena bergantung dengan persetujuan tersebut.

Deputy Manager Project Mobil Cepu Ltd Thor Sutanassin, me-

ngatakan jadwal program pengembangan proyek Banyuwati yang diperkirakan menelan dana US \$ 70 juta saat ini bergantung pada pencairan *budget* yang diajukan ke BP Migas.

Program pengembangan proyek meliputi beberapa hal diantaranya program kerja, pembebasan lahan, *front end engineering and*

design, proses tender dan kegiatan pengeboran. "Semua rencana ini menunggu persetujuan *budget* dari BP MIGAS," ujar Thor di sela buka puasa bersama di Hotel S-hangrila Surabaya Selasa (10/10).

Tentang mundurnya pencairan *budget* tersebut, Thor, mengatakan hal itu terkait adanya kehati-hatian dari BP Migas sehingga

tidak menimbulkan kritik di kemudian hari. "BP Migas ingin lebih mengerti dan berhati-hati dalam memberikan persetujuan ini," katanya.

Thor mengakui dengan keterlambatan persetujuan ini memperlambat rencana kerja yang telah ditetapkan. Tapi, keterlambatan itu, katanya, sudah diantisipasi oleh Exxon, sehingga tidak akan sampai mengganggu secara serius rencana kerja kedepan. Namun demikian, Thor berharap dalam waktu dekat persetujuan itu bisa dikeluarkan, sehingga titik penyelesaian bisa dituntaskan dan rencana pengeboran bisa dilakukan lebih awal meskipun dalam jumlah sedikit. (ros)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2006																			

9 Perusahaan Asing Minati 21 Blok Migas

JAKARTA – Dalam pemasukan dokumen penawaran tender 21 wilayah kerja (WK) migas melalui mekanisme penawaran langsung (*direct offer*), sebanyak 20 WK diminati dan satu WK yakni Situbondo tidak diminati.

Tercatat sebanyak sembilan perusahaan multinasional seperti ConocoPhillips, Exxon-Mobil, Chevron, Premier Oil, Yapex, Total, Amerada Hess, CNOOC, ENI terdaftar memasukkan dokumen.

Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Luluk Sumiarso mengatakan, terdapat tiga WK yang diminati dua investor. "Penutupan pemasukan pada pukul 14.30 WIB, WK Situbondo sama sekali tidak diminati," katanya, Rabu (11/10). Dia mengatakan, evaluasi akan dilakukan selama tiga minggu dan diharapkan setelah evaluasi akan langsung diperoleh pemenang.

Luluk mengatakan, meski banyak WK yang hanya diminati oleh satu investor, belum tentu hak/kesempatan pertama untuk memiliki (*first right refusal*) berlaku pada investor yang mema-

sukkan dokumen tersebut. "Belum tentu, dia (investor) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti *joint study* dan sebagainya," tuturnya. Dia mengatakan, prosedur tender harus tetap dijalankan.

Dia menjelaskan, mekanisme penawaran langsung tidak bisa diartikan sebagai mekanisme penunjukkan langsung. "Harus dilihat dulu persyaratan-persyaratan apakah sudah dipenuhinya, misalnya investor lain lebih bagus ya bisa saja investor yang menawarkan dulu malah tidak dapat," katanya.

Direktur Bina Usaha Hulu Migas Ditjen Migas R. Priyono menambahkan, pihak-pihak yang sudah menyatakan akan melakukan *joint study* di daerah-daerah *frontier* adalah

Total, Eni, ConocoPhillips, CNOOC, dan Amerada Hess. "WK yang paling banyak diminati adalah yang berada di Sumatera Selatan," katanya. Menurutnya, bonus pertama yang bakal diterima negara untuk tahap awal bisa sekitar US\$ 21 juta.

Ke-21 WK itu terdiri atas i, WK

Duyung di lepas pantai Natuna, WK Pari di lepas pantai Natuna, WK Tonga di daratan Sumatera Utara, WK Lemang di daratan Sumatera Tengah, WK Batu Gajah di daratan Sumatera Tengah, WK Batanghari di daratan Sumatera Tengah, WK Karangagung di daratan Sumatera Selatan, WK Sekayu di daratan Sumatera Tengah, WK Alas Jati di daratan Jawa Timur.

Lalu, WK Gunting di daratan dan lepas pantai Jawa Timur, WK Situbondo di daratan dan lepas pantai Jawa Timur, WK North Kangean di lepas pantai Jawa Timur, WK Sibaru di di lepas pantai Jawa Timur, WK West Sangatta di daratan Kalimantan Timur, WK Kutai di daratan dan lepas pantai Kalimantan Timur, WK Mahakam Hilir di daratan Kalimantan Timur.

Juga, WK Wain di daratan Kalimantan Timur, WK Kuma di lepas pantai Sulawesi Barat, WK Kudong di daratan Sulawesi Barat, WK Karana di Selat Makasar, WK Buton di daratan dan lepas pantai Sulawesi Tenggara. (ari)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 14										TAHUN 2006																				

Proyek Biodiesel Astra Agro Mulai Berproduksi

JAKARTA - PT Astra Agro Lestari Tbk memulai uji coba produksi proyek *biodiesel* berbahan dasar kelapa sawit di Kumai, Kalimantan Tengah pada September 2006.

Proyek senilai Rp 2 miliar tersebut bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) dan merupakan ekspansi bisnis perusahaan perkebunan itu.

Direktur Astra Agro Lestari Juliani E Syaftari mengungkapkan hal itu kepada *Investor Daily* di Jakarta, Rabu (11/10). "*Biodiesel* yang dihasilkan cukup lumayan dan akan kami pantau secara berkelanjutan sebelum memutuskan menjalankan proyek ini secara permanen. Kemungkinan proyek ini akan diperbesar tahun depan," kata dia.

Hasil studi sejumlah lembaga menyebutkan, kapasitas produksi *biodiesel* untuk mencapai skala ekonomis paling ideal adalah sebesar 100 ribu ton per tahun. Nilai investasi yang diperlukan untuk itu mencapai sekitar US\$ 20 juta.

Menurut Juliani, ekspansi perseroan di *biodiesel* dan *biofuel* akan dijalankan secara hati-hati dan tidak seagresif pemain-pe-

main lain. Salah satu perusahaan publik yang segera memulai proyek *biodiesel* adalah PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Sedangkan PT SMART Tbk dan PT Indofood Sukses Makmur dalam tahap peninjauan.

Astra Agro hingga tahun depan masih memfokuskan bisnisnya pada pencarian lahan-lahan garapan baru khususnya di Pulau Kalimantan yang menjadi basis produksi. Perseroan menargetkan mampu memperoleh tambahan lahan baru seluas 15 ribu hektare (ha) pada 2006 dan 17 ribu ha pada 2007.

Untuk itu, Astra Agro menganggarkan belanja modal (*capex*) sebesar Rp 550 miliar -600 miliar pada tahun ini dan meningkat menjadi Rp 700 miliar tahun depan. Sekitar 60-65% dari *capex* tersebut dialokasikan untuk mengakuisisi lahan baru dan pemeliharaan lahan sawit yang belum berproduksi di Kalimantan.

Juliani menambahkan, rencana Astra Agro ke bisnis pembuatan bahan bakar nabati atau *biofuel* melalui penanaman pohon jarak di sebagian lahan baru hasil pembelian dari PT Borneo Indah Marjaya masih pada tahap peninjauan. (gie)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: A18										TAHUN 2006																				

Fahmi Protes Keras Impor Tabung Elpiji

JAKARTA — Menteri Perindustrian Fahmi Idris memprotes rencana PT Pertamina (Persero) mengimpor tabung gas elpiji. Dia juga mensinyalir permainan tertentu dari segelintir pejabat untuk mendapatkan komisi dari kegiatan impor tersebut.

Dia mengatakan, untuk menyampaikan protes tersebut, jajarannya akan mengadakan pembicaraan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta direksi Pertamina.

Fahmi juga mengaku khawatir kegiatan impor itu dimanfaatkan segelintir pejabat tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Dia juga optimistis kapasitas produksi produsen tabung gas dalam negeri masih bisa memenuhi permintaan Pertamina sebanyak 800 ribu tabung ukuran tiga kilogram hingga akhir 2006. ● FERY FIRMANSYAH

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 8											TAHUN 2006																			

Petronas Tetap Beroperasi di Chad

Kuala Lumpur - Perusahaan minyak Malaysia, Petronas, akan mempertahankan kehadirannya di Chad setelah menyelesaikan masalah perselisihan pajak dengan pemerintah Chad yang mengancam akan menutup keberadaan Petronas di negara Afrika tersebut. Demikian ungkap media Malaysia, Selasa (10/10).

"Semua pihak senang bahwa isu tersebut telah selesai," kata CEO Petronas, Hassan Marican kepada kantor berita *Bernama*.

Pemerintah Chad, Jumat (6/10), mengumumkan bahwa Petronas dan perusahaan minyak Amerika Serikat (AS), Chevron, telah mencapai perjanjian di mana kedua perusahaan akan membayar kembali pajak atas keuntungan yang diraihnya pada tahun 2005 dan 2006.

Kedua perusahaan setuju membayar pajak tersebut yang total nilainya mencapai US\$ 281,6 juta. Petronas dan Chevron Texaco termasuk dalam

konsorsium yang bekerja sama dengan ExxonMobil untuk mengeksploitasi minyak di negara Afrika tersebut.

(ant/bernama)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

OPEC Resmi Kurangi Produksi

■ JAKARTA-Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) telah secara resmi mengurangi produksi minyak satu juta barel per hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan hal itu sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII di DPR, Selasa (10/10) siang.

"Kita sudah setuju kalau itu memenuhi kuota," ujar Purnomo yang mengaku sudah menerima surat resmi dari OPEC.

Menurutnya, pengurangan produksi berlaku pro-rata terhadap kuota masing-masing negara. Sementara itu, Indonesia tidak ada yang dikurangi, karena Indonesia belum memenuhi kuota dari OPEC.

(ega)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 13		TAHUN 2006

Oil slides as OPEC impatience mounts

Reuters
Singapore

Oil sank below US\$58 a barrel on Wednesday, nearing an eight-month low as traders grew impatient with OPEC's haggling on details of an output cut and after the West's energy watchdog cut its oil demand growth forecast.

U.S. crude lost 60 U.S. cents to \$57.92 a barrel by 08:40 GMT, deepening Tuesday's \$1.44 retreat to come near last week's \$57.75 low, the weakest since February. London Brent crude tumbled 64 U.S. cents to \$58.70.

"We're seeing a continua-

tion from yesterday — there's no firm decision on the OPEC cut and in the United States they're saying that the winter will be warmer than expected. All these things point to lower prices," said a ICE trader in London.

Adding to the bearish sentiment, the International Energy Agency (IEA) on Wednesday trimmed its forecast for global oil demand growth next year by 90,000 barrels per day (bpd) to 1.45 million bpd because of slightly weaker U.S. demand.

Despite OPEC's apparent agreement on the principle of a 1 million-bpd output cut, a debate over the details of how

and when to cut has held up a formal deal, its first cut in two and a half years to stem a more than \$20 fall.

The main stumbling block appears to be whether to make a reduction from OPEC's notional 28 million-bpd production ceiling or from actual supply of near 27.5 million bpd in September.

Iran's OPEC governor said in the oil ministry's Web site on Tuesday talks continued on the plan over the first supply cut since April 2004.

Ministers remain undecided over whether to meet in person to formalize the cut before the next scheduled gathering on Dec. 14, an official at OPEC's Vienna head-

quarters said.

The U.S. Energy Information Administration (EIA) said on Tuesday in its monthly oil market report that actual supply cuts by OPEC as a group would be less than stated because cuts were prorated among its members based on previous quota levels, and several members were already producing below their quotas.

Despite the pledge to reduce supplies oil prices have yet to rebound, with traders fearing the action may be too little or too late to offset swelling inventories.

"Basically fundamentals

are weak with accumulated stocks of crude oil and products, and maybe decreasing demand from Asian markets, other than China, and the U.S.," said Keiichi Sano, manager with the commodities business unit at Sumitomo Corp.

U.S. data due on Thursday — a day later than usual — is expected to show an 800,000-barrel increase in crude stocks and a 100,000-barrel rise in distillate inventories, but a 500,000-barrel draw on ample gasoline stocks, a Reuters survey found.

U.S. government weather forecasters said on Tuesday they expected El Nino to bring

warmer-than-average temperatures across much of the country for the winter season.

Supply concerns also eased after the Trans-Alaska Pipeline resumed service after an almost 10-hour shutdown due to flooding that caused communication problems on Tuesday.

The line carries about 750,000 bpd of crude oil to a terminal in Valdez in southern Alaska where tankers are loaded. BP's 400,000-bpd Prudhoe Bay — the biggest oilfield in the United States — was also forced to shut down due to a power outage, but output was due to be restored late in the day.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 4										TAHUN 2006																				

Menperin Protes Impor Tabung Gas

Ada Permainan Segelintir Pejabat yang tak Pro-Bisnis

JAKARTA, (PR).-

Menteri Perindustrian Fahmi Idris memprotes rencana Pertamina mengimpor tabung gas elpiji guna memenuhi kebutuhan konversi penggunaan kompor minyak tanah ke gas tahun ini. "Impor tabung gas tidak pro-bisnis, tidak pro tenaga kerja dan tidak pro pengentasan kemiskinan. Bahaya itu, dan saya protes keras kalau masih ada impor, kecuali kapasitas produksi kita tidak mampu," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/10).

Beberapa waktu lalu, Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka (ILMTA) Deperin

Anshari Bukhari mengatakan, Menperin secara resmi telah mengirimkan surat mengenai penolakan impor tabung gas kepada Pertamina namun belum ada balasan.

Ia mengatakan, keberatan impor tabung gas dilakukan karena sebenarnya 14 produsen tabung gas di dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan tabung gas tahun ini, namun karena waktunya pendek (hanya sekitar tiga bulan dari September ke Desember 2006) maka kemampuan produksinya hanya sekitar 650.000 unit.

Selain itu, kalangan industri tabung gas di dalam negeri juga

telah menambah investasinya, seperti Wijaya Karya (WIK) telah investasi Rp 5 miliar guna meningkatkan produksi menjadi 100.000 unit. BUMN baja yaitu PT Krakatau Steel sebagai pemasok bahan baku baja telah menyatakan sanggup memasok delapan ribu ton baja sesuai spesifikasi yang diminta untuk bahan baku sekitar 800.000 unit tabung gas.

Penolakan Deperin juga didasari bahwa dengan penggunaan keseluruhan produksi tabung gas di dalam negeri, maka ada nilai tambah yang lebih besar, baik berupa perluasan tenaga dan lapangan kerja

serta meningkatkan kinerja industri nasional.

Deperin juga telah meminta Pertamina memperpanjang waktu pasokan tabung gas yang harus diserahkan kalangan industri di dalam negeri pada Desember 2006 menjadi Maret 2007. Tahun 2006 diserahkan sekitar 650.000 unit tabung gas dan (Maret) tahun 2007 sisanya 150.000 unit.

Permainan pejabat

Ketua Umum Asosiasi Tabung Baja (Asitab), Tjiptadi mengatakan, sampai saat ini produsen tabung gas domestik dan Pertamina belum sepakat mengenai harga jual per unit

dalam dua kali pertemuan terakhir. Asitab mengusulkan harga per unit Rp 100.000,00. Sedangkan harga harga tabung gas impor senilai USD 5,8 per unit (FOB/Free on Board) dan dengan bea masuk 15% menjadi Rp 70.000,00 per unit. Pertamina sendiri meminta harga jual tabung gas di bawah Rp 90.000,00 per unit yang menurut Asitab sulit dipenuhi.

Pada bagian lain Fahmi mensinyalir rencana impor tabung gas dari Cina oleh Pertamina sarat permainan pejabat yang mencari untung. "Ada permainan tertentu dari segelintir pejabat demi keuntungan prib-

adi. Saya khawatirkan impor itu ada komisinya. Komisi impor, itu yang diincar pejabat yang mengizinkan adanya impor," tegas Fahmi dengan nada keras.

Karena itu, menurutnya, pihaknya akan melakukan protes keras adanya rencana impor ini mengingat produsen dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan pasokan tabung gas yang diperlukan dalam rangka konversi minyak tanah ke gas.

"Saya protes keras jika masih ada impor tabung gas, saat ini banyak pejabat kita yang tidak probisnis, tidak pro produksi dalam negeri," tegasnya. (A-34/ant/dtc/tnr)***

41

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 2		TAHUN 2006

Kebutuhan Gas Meningkat

Penyerapan Tenaga Kerja 20 Kali Lipat

JAKARTA (Media): Pemangku kebijakan energi diminta mengutamakan pasokan gas alam cair (*liquified natural gas/LNG*) ke dalam negeri. Peralnya kebutuhan gas untuk industri domestik cenderung meningkat.

"Apalagi penggunaan gas untuk kebutuhan industri di dalam negeri akan menyerap sampai 20 kali lipat tenaga kerja lebih besar jika dibandingkan dengan gas hanya diproduksi sebagai LNG untuk ekspor," kata Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Departemen Industri Benny Wahyudi di Jakarta, kemarin.

Saat ini kebutuhan gas dalam negeri terutama di Jawa terus meningkat. Tahun lalu, diperkirakan permintaan gas di Jawa mencapai 2.406 juta kaki kubik per hari (*million standard cubic feet per day / mscfd*), padahal pasokan hanya 973 mscfd. Artinya, terjadi defisit 1.433 mscfd.

Benny menegaskan tingginya kebutuhan gas bagi industri domestik ini juga memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Deperin sendiri, lanjutnya, telah melakukan kajian korelasi antara penyerapan tenaga kerja dan produksi LNG. Satu *train* setara dengan 250 mscfd hanya menyerap 250 tenaga kerja atau setara dengan satu orang per mscfd. Penyerapan tenaga kerja di industri hilir lebih besar lagi.

Selain penyerapan tenaga kerja, pemenuhan pasokan gas ke dalam negeri ini juga memberi nilai tambah dari pengolahan LNG menjadi berbagai produk yang bisa dituju-

kan untuk pasar ekspor.

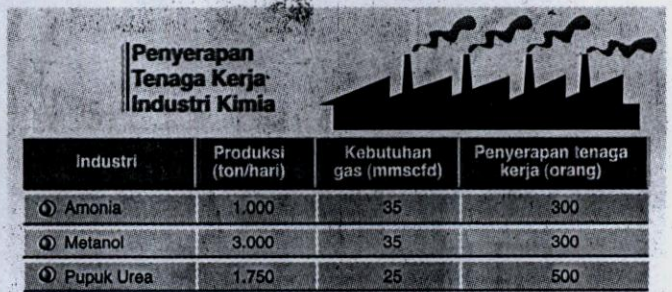
"Tapi kalau LNG-nya diekspor, nilai tambahnya ada di negara tujuan ekspor itu. Sebab di negara itu, LNG juga dimanfaatkan untuk bahan baku petrokimianya atau pun industri lainnya," ujar Benny.

konsistensi pasokan gas antara lain industri keramik, cat, logam, pupuk, dan industri lain yang mayoritas adalah padat karya.

Jalur pipa

Usai melihat kebutuhan gas domestik yang meningkat, Kepala Pusat Kebijakan Keenergian Institut Teknologi Bandung (ITB) Ucok WR Siagian menilai pembangunan pisanisasi gas Kalimantan-Jawa sudah mendesak dilakukan.

"Memang sudah urgen karena



Sumber: Deperin

MOLLER

Hal senada juga dikemukakan Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto. Menurutnya, penggunaan gas untuk kegiatan produksi di dalam negeri akan memberi nilai tambah lima kali lebih besar dibandingkan ekspor LNG.

"Lagi pula harga gas lebih murah daripada bahan bakar minyak dan ini jelas memberi efek meningkatkan daya saing produk nasional," katanya.

Industri yang membutuhkan

tren BBM akan terus naik, sedangkan gas di sekitar Jawa sudah tidak cukup," jelasnya.

Kalau tidak ada pipa, menurutnya, bisa menjadi alasan kuat bagi orang-orang yang pro terhadap ekspor untuk mengisi kebutuhan LNG di negara lain. "Padahal kita butuh gas," tegasnya.

Ucok menambahkan jika jalur pipa sudah tersedia, pemakaian gas dalam negeri bisa meningkat dan impor BBM bisa ditekan. (Uut/E-2)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

PEMANGKASAN PRODUKSI OPEC

TAHUN 2006

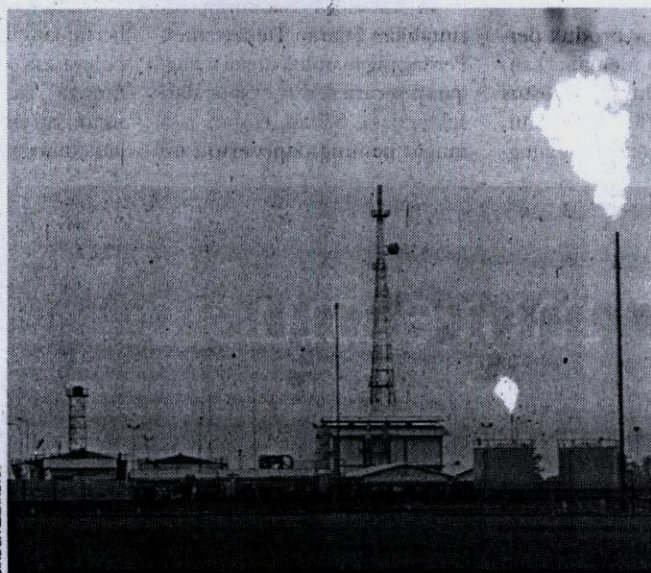
Harga Minyak Dunia Tetap Turun

LONDON (SINDO)—Harga minyak dunia tetap turun kendati Organisasi Negara-Negara Peng-ekspor Minyak (OPEC) telah me-nyerukan kepada anggotanya untuk mengurangi produksi mi-nyak hingga 1 juta barel per hari. Padahal, kebijakan pembatasan kuota produksi itu dimaksudkan untuk mengerem laju penurun-an harga minyak dunia yang cen-derung melemah sejak akhir Agustus lalu.

Di pasar komoditas New York Mercantile Exchange, harga mi-nyak jenis *light sweet* untuk pe-ngiriman November telah turun USD16 sen menjadi USD58,36 per barel pada perdagangan elektronik sebelum pasar resmi dibuka. Bahkan, nilai itu sebe-lumnya turun fluktuatif antara USD58 hingga USD57,87 per barel. Sementara di London, je-nis *brent north sea* untuk pengirim-an November turun USD11 sen menjadi USD59,23 per barel dalam perdagangan elektronik.

Seperti dilansir *AFP*, Presiden OPEC Edmund Daukoru kemari secara resmi mengumumkan pengurangan produksi minyak pada negara-negara anggotanya sampai dengan 1 juta barel per hari. "Keputusan kami (OPEC, Red) memotong hingga 1 juta barel per hari merupakan kese-pakatan. Semua anggota setuju," tegasnya.

Menurut dia, kesepakatan itu telah disetujui 11 negara anggota OPEC. Karenanya, kebijakan terse-but paling tidak baru akan ber-dampak pada harga minyak un-tuk pengiriman Desember. "Sete-lah sepakat hari ini (kemarin, Red), saya berharap masalah



EKSPLORASI MINYAK: Eksplorasi minyak PT Pertamina (persero) di Jawa Barat. Pengurangan kuota produksi minyak oleh negara-negara anggota OPEC gagal mencegah penurunan harga minyak.

distribusi juga langsung dapat diputuskan sekarang," ujar dia.

Analisis Sucden, Michael Davies, mengatakan, turunnya harga minyak membuktikan bahwa kebijakan kuota produksi OPEC tidak dapat memengaruhi pasar minyak dunia. Sebab, selama ini banyak negara anggota OPEC berproduksi di bawah kuota yang ditetapkan. "Mereka yang paling bertanggung jawab pada kenaikan harga minyak dunia yang menembus rekor tertinggi sekitar USD78 per barel pada Juli dan Agustus lalu," ujar dia.

Sementara itu, International Energy Agency (IEA) dalam laporan bulanannya menganggap positif kebijakan OPEC mengu-rangi kuota produksi meskipun pihaknya meyakini bahwa harga minyak dunia yang tidak stabil

baru-baru ini lebih disebabkan ketidakseimbangan global dan pertumbuhan ekonomi China. "Selain itu, pengaruh *stock-building* dan lambatnya per-mintaan juga jadi penyebab pe-nurunan," demikian bunyi la-poran itu.

Namun, IEA optimistis, pada 2007 pasar minyak dunia akan menggeliat. Pihaknya melihat naiknya total permintaan mi-nyak dunia tahun 2006 sebesar 1,2% menjadi 84,6 juta barel per hari memberi stimulan kenaikan pada 2007 sebesar 1,7% menjadi 86,0 juta barel per hari.

Prediksi ini lebih pesimistis dari perkiraan IEA sebelumnya yang menyebutkan permintaan minyak dunia akan tumbuh da-lam kisaran 1,3% untuk 2006 dan 1,8% pada 2007. (AFP/CR-04)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B12

TAHUN 2006

'Harga minyak bakal US\$55/barel'

Oleh ADHITYA NOVIARDI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pelaku pasar memprediksi harga minyak dapat menyentuh level US\$55 per barel, menyusul kian menurunnya tensi geopolitik dan sejumlah faktor yang memengaruhi kenaikan harga komoditas itu.

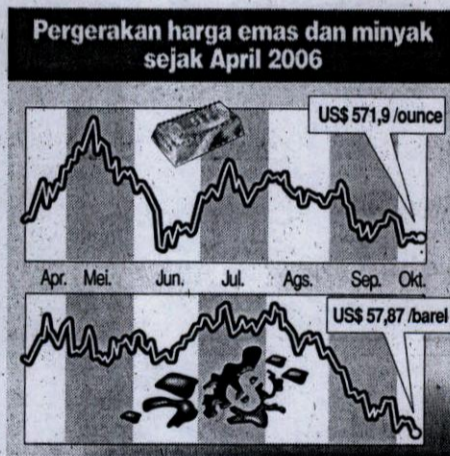
Sementara itu, harga emas di Asia turun 0,2% mengikuti penurunan harga minyak dunia. Penurunan harga logam dipicu laporan dari pemerintah AS yang menyebutkan tidak ada lagi kegiatan percobaan nuklir di Korut.

Peter McGuire, Managing Director Commodity Warrants Australia, mengatakan kini mulai bermunculan alternatif investasi yang menjanjikan pada sejumlah instrumen seperti emas dan logam mulia lainnya, serta komoditas pertanian.

Harga minyak bumi kemarin telah menyentuh level terendahnya sepanjang tahun ini yakni pada posisi US\$57,87 per barel.

Menurut *Bloomberg*, pelaku pasar memprediksi organisasi negara pengeksport minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) bakal membatalkan rencana pemotongan produksi.

International Energy Agency (IEA) memprediksi permintaan minyak akan turun sepanjang tahun ini dan kondisi



itu bakal berlanjut hingga 2007.

Pada perdagangan dua hari sebelumnya harga minyak sempat menyentuh posisi terendahnya dalam delapan bulan terakhir, setelah Arab Saudi menyatakan akan memenuhi permintaan konsumen Asia dan Eropa.

IEA juga memangkas prediksi permintaan minyak global, seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi AS.

Badan energi internasional ini memperkirakan permintaan minyak dunia hanya mencapai 84,57 juta barel per hari, atau lebih rendah 110.000 barel per hari dari perkiraan sebelumnya.

Menyinggung penurunan harga emas, hal itu terjadi setelah Gedung Putih menyampaikan tidak ada tanda-tanda percobaan kedua bom nuklir di Korea Utara. Setelah informasi resmi itu mencuat, pelaku pasar emas mulai melakukan aksi memborong komoditas itu.

"AS meredakan pasar, sehingga investor kembali menjual emas. Memang pada awalnya yang memicu kenaikan harga emas adalah naiknya harga minyak. Namun, harga minyak kembali turun kemarin," kata Darren Heathcote, kepala perdagangan Investec Australia.

Harga emas untuk pengiriman segera turun 0,2% menjadi US\$571,90 per ounce dan sempat diperdagangkan pada posisi US\$572,20 perdagangan sesi siang waktu Sydney. Harga logam mulia ini telah anjlok 22% dari US\$730,40 per ounce, posisi tertinggi dalam 26 tahun terakhir.

Harga emas untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mer-

contile Exchange naik US\$3,60 atau 0,6% menjadi US\$579,80 per ounce.

Konsumsi rendah

Mengenai konsumsi minyak global pada 2007, pelaku pasar memperkirakan lebih rendah 200.000 barel per hari menjadi 86,02 juta barel. Menurut Lawrence Eagles, kepala divisi pasar IEA, saat ini terlihat tren penurunan permintaan seperti yang terjadi di AS.

Harga minyak untuk pengiriman November di New York sempat mengalami penurunan US\$1,44 atau 2,4% pada perdagangan dua hari lalu. Penurunan itu merupakan yang terbesar sejak 16 Februari.

Gubernur OPEC Indonesia Maezar Rahman mengatakan, sebagian pelaku pasar saat ini meragukan keputusan organisasi negara pengekspor minyak itu untuk memangkas produksi sebesar satu juta barel per hari.

"Tidak gampang menyatukan suara ke-11 menteri perminyakan OPEC ini untuk memangkas produksinya. Pasalnya harus mencari angka pengurangan produksi yang adil bagi setiap negara," ucapnya kepada *Bisnis*.

Meski demikian, lanjut Maezar, OPEC sepakat melakukan konsensus setidaknya dalam dua hingga tiga hari ke depan. (04)(adhitya@bisnis.co.id)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 15											JAKARTA (SINDO) - Kajian Departemen Perindustrian (Depperin) menyatakan bahwa pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan dalam negeri memberi nilai tambah berupa penyerapan tenaga kerja 20 kali lipat jika dibandingkan produksi gas langsung diekspor. Selain itu, pemanfaatan gas domestik juga memberi nilai tambah berupa produk olahan yang lebih bernilai.							TAHUN 2006												

GAS UNTUK DOMESTIK

Serap Tenaga Kerja 20 Kali Lipat

JAKARTA (SINDO) - Kajian Departemen Perindustrian (Depperin) menyatakan bahwa pemanfaatan produksi gas untuk kebutuhan dalam negeri memberi nilai tambah berupa penyerapan tenaga kerja 20 kali lipat jika dibandingkan produksi gas langsung diekspor. Selain itu, pemanfaatan gas domestik juga memberi nilai tambah berupa produk olahan yang lebih bernilai.

"Penggunaan gas untuk kebutuhan industri di dalam negeri akan menyerap sampai 20 kali lipat tenaga kerja lebih besar dibandingkan jika gas hanya diproduksi sebagai LNG (*liquid natural gas*) untuk ekspor," ungkap Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Depperin Benny Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima SINDO, kemarin.

Kebutuhan tenaga kerja itu, kata dia, timbul dari tumbuhnya industri yang berbahan baku gas di berbagai daerah, terutama yang dekat dengan sumber gas tersebut. Kajian itu, jelas dia, tertuang dalam rencana induk (*master plan*) kebutuhan untuk sektor industri yang disusun Depperin.

Dalam rencana induk itu, papar dia, diperbandingkan antara tenaga kerja langsung yang diserap produksi LNG untuk satu *train* setara dengan 250 juta kaki kubik per hari yang hanya menyerap 250 tenaga kerja atau setara dengan satu orang per 1 juta kaki kubik per hari. Sementara itu, bila gas dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri, terutama industri amonia, urea, dan metanol, penyerapan tenaga kerja jauh lebih banyak.

Depperin memperhitungkan, untuk produksi amonia sebesar 1.000 ton per hari dengan kebutuhan gas setara 35 juta kaki kubik per hari mampu mempekerjakan 300 orang atau setara dengan 8,6 orang per juta kaki kubik per hari. Sama halnya dengan amonia, produksi metanol



NILAI TAMBAH: Kajian Departemen Perindustrian menyebutkan pemanfaatan LNG di dalam negeri memiliki nilai tambah lebih besar ketimbang diekspor.

3.000 ton per hari dengan kebutuhan gas setara 35 juta kaki kubik per hari juga mempekerjakan 300 orang.

Penyerapan tenaga kerja yang lebih besar terjadi pada industri pupuk urea yang dengan produksi sebesar 1.750 ton per hari, termasuk amonia, dengan kebutuhan gas setara 25 juta kaki kubik per hari, mampu menyerap 500 tenaga kerja atau setara dengan 20 orang per juta kaki kubik per hari.

Selain itu, tambah Benny, bila gas diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk kimia tersebut, nilainya pun jauh meningkat. Dia mencontohkan, bila LNG hanya dihargai sekitar USD2,4 per mmbtu (*million metric british thermal unit*), harga amonia bisa mencapai USD350 atau setara dengan USD9,14 per mmbtu. Sementara harga urea dan metanol masing-masing setara dengan USD7,18 dan USD8,53 per mmbtu dengan asumsi harga urea USD250 per ton dan metanol USD290 per ton.

"Kalau LNG diekspor, nilai tambahnya ada di negara tujuan ekspor itu karena di negara itu LNG juga dimanfaatkan untuk bahan baku petrokimia ataupun industri lainnya," papar Benny.

Namun, tambah Benny, un-

tuk menggairahkan para investor agar berminat mengeksplorasi cadangan gas dan mau menjualnya di dalam negeri, harga jual domestik pun jangan terlalu rendah. Selain itu, infrastruktur transportasi gas pun harus disiapkan agar industri bisa mendapat harga gas yang terbaik.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Djimanto menyatakan dukungannya atas penggunaan gas untuk kebutuhan domestik. Dia sepakat bahwa hal itu akan menyebabkan efek berantai yang lebih besar, baik pembukaan lapangan kerja baru maupun penyerapan tenaga kerja.

"Kalau kegiatan produksi di Indonesia sudah gas *minded*, hal itu bisa menurunkan biaya produksi dibandingkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kalau biaya sudah berhasil ditekan, daya saing pun akan meningkat," katanya.

Lebih lanjut, Djimanto mengatakan bahwa prioritas penggunaan gas di dalam negeri juga akan mendorong tumbuhnya industri-industri kecil, menengah maupun besar yang sifatnya padat karya yang sangat dibutuhkan Indonesia guna mengatasi pengangguran.

(rakhmat baihaqi)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 4		
TAHUN 2006		

Pertamina Digoyang Panja Karaha Bodas

Karaha Bodas Company (KBC) yang meng-knock out (KO) pemerintah, membuat gerah Komisi VII DPR. Anggota Komisi VII dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Nizar Dahlan mengusulkan agar segera dibentuk Panitia Kerja (Panja) Pertamina soal kasus KBC.

Jakarta, RM

Menurut Nizar, Panja Pertamina perlu dilakukan guna menyelamatkan kondisi BUMN minyak dan gas itu yang penuh dengan carut marut. "Kalau kita ingin menyelamatkan Pertamina, maka kita harus segera membentuk Panja Pertamina," tegas Nizar di Jakarta, kemarin.

Menurut Nizar, carut marut yang terjadi di tubuh Pertamina bukan saja merugikan negara. Tetapi juga sangat merugikan rakyat sebagai pemilik sah republik ini.

"Banyak yang main dan menikmati dari kondisi tersebut dan ini harus diberantas. Pertamina sendiri harus dibenahi agar bisa bermanfaat maksimal untuk rakyat dan sebagaimana dimintakan Presiden SBY saat mengunjungi Pertamina bahwa BUMN itu harus menjadi perusahaan *go international*," tandasnya.

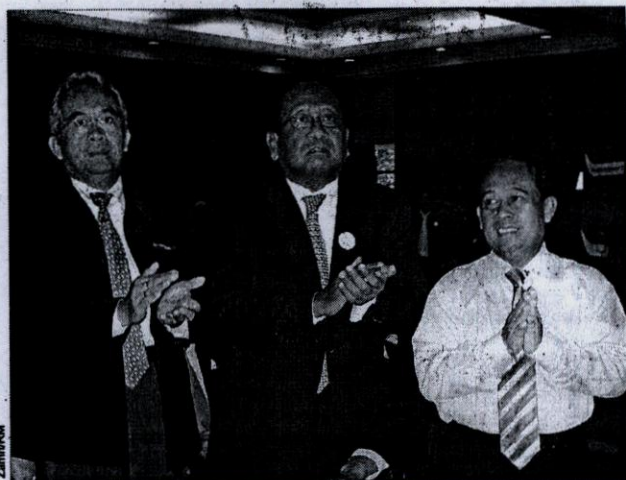
Senada dengan Nizar, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Alvin Lie juga mengungkapkan

kekecewaannya karena banyak pihak yang bermain di Pertamina.

Lebih lanjut anak buah Amien Rais itu mempertanyakan status kasus Karaha Bodas. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus Karaha Bodas? Menurut Pertamina, yang seharusnya membayar itu pemerintah karena pemerintah yang menghentikan proyek tersebut. Tapi pemerintah berpendapat masalah itu harus diselesaikan secara *corporate*," kata Alvin.

Menurut Alvin, kasus Karaha Bodas merupakan masalah yang sangat serius. Karena itu, perlu kejelasan tentang langkah ke depan yang akan diambil pemerintah. "Jangan dianggap enteng, ini jelas sangat merugikan negara," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah dan Pertamina nampaknya belum kompak dalam menyelesaikan kasus kalahnya pemerintah melawan KBC. Pemerintah dan Pertamina terkesan



Dirut Pertamina Ari Soemarno (tengah) didampingi Direktur Hulu Sukusen Soemarinda (kiri) dan Wakil Dirut Iin Arifin Tahyan.

saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab.

"Kasus tersebut diserahkan kepada *company to company*. Tapi memang dulu dari 27 pembangkit listrik swasta, dulu kan hanya ditangani satu tim dengan dipayungi Keppres," tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro (*Rakyat Merdeka*, 11/10).

Menurut Purnomo, saat ini pun

pemerintah belum bisa menentukan sikap karena itu sepenuhnya ditangani oleh Pertamina. "Memang kan waktu dulu disepakati, dalam penyelesaiannya Pertamina di depan," tegasnya.

Dirut PT Pertamina (Persero) Ari H. Soemarno mengaku mikir-mikir untuk membayar tuntutan Karaha Bodas Company (KBC) sebesar 261 juta dolar AS per tahun termasuk bunga sesuai de-

ngan keputusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat.

"Kita lihat ini tanggung jawab siapa? Kita minta ketegasan dari semua. Jangan Pertamina yang dibebani semua dong. Kalau kita penuhi semua tuntutan ini, kita keberatan," katanya.

Menurut Ari, jika saat itu tidak ada keputusan pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut, maka proyek panas bumi itu tetap berjalan. "Kalau proyek itu jalan terus dan sekarang rugi, ya Pertamina yang tanggung. Tapi proyek itu malah dihentikan oleh pemerintah. Kalau yang harus bayar itu Pertamina, kan lucu juga. Orang yang menghentikan itu kan bukan Pertamina," kelit Ari lagi.

Kasus Karaha Bodas ini bermula ketika pemerintah tahun 1997 menghentikan kontrak dengan KBC terkait pembangunan pembangkit listrik di Indonesia akibat krisis ekonomi. Kasus ini berlarut-larut sampai ke Pengadilan Tinggi di New York, AS, yang memutuskan memenangkan KBC sehingga Pertamina serta PT PLN (Persero) diharuskan membayar denda 261 juta dolar AS per tahun, termasuk bunga. ■ IU/WIN

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

'Harga gas domestik jangan terlalu rendah'

Oleh ISMAIL FAHMI & AFRIYANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah menilai untuk mengarahkan produsen gas beralih ke pasar domestik, maka harus diciptakan agar harga jual bahan bakar itu di dalam negeri tidak terlalu rendah.

Gencarnya produsen menjual gas ke mancanegara dalam bentuk gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*), dimungkinkan karena disparitas harganya lebih tinggi dibandingkan penjualan ke pasar domestik.

Oleh karena itu, menurut Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Departemen Perindustrian Benny Wahyudi, untuk

menarik produsen berpaling ke pasar dalam negeri, maka perbedaan harga gas untuk ekspor dengan penjualan dalam negeri tidak boleh terlalu jauh.

"Selain itu, infrastruktur penyaluran gas di dalam negeri harus disiapkan agar industri bisa mendapat harga yang terbaik," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Selain mengalihkan orientasi pasar, lanjutnya, terciptanya harga gas yang kompetitif di dalam negeri juga dapat memancing minat investor untuk melakukan eksplorasi cadangan gas yang tersedia.

Benny menjelaskan berdasarkan kajian Depperin yang

tertuang dalam rencana induk (*master plan*) Kebutuhan Industri, pemanfaatan gas untuk bahan baku industri akan memberikan nilai tambah yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Sebagai contoh, menurut dia, tenaga kerja yang diserap untuk memproduksi 1 train LNG atau setara 250 MMscfd (juta kaki kubik per hari) hanya sekitar 250 orang atau 1 orang per 1 juta kaki kubik per hari.

"Sedangkan bila gas dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri terutama amonia, urea, dan metanol, maka akan menyerap tenaga

kerja yang jauh lebih banyak," paparnya.

Menurut perhitungan Depperin, untuk produksi amonia sebanyak 1.000 ton per hari dengan kebutuhan gas setara 35 MMscfd mampu mempekerjakan 300 orang atau setara 8,6 orang per MMscfd.

Kaltim-Jateng

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Keenergian ITB Ucok W.R. Siagian menilai proyek pipanisasi gas dari Kaltim ke Jateng perlu segera direalisasikan guna mengatasi kelangkaan pasokan gas di Jawa di tengah tingginya permintaan terhadap gas oleh sejumlah industri.

Industri padat karya seperti keramik, cat, logam, dan pupuk kini butuh konsistensi pasokan gas. Karena itu, agar masalah ini bisa diselesaikan, maka harus diupayakan agar jangan sampai terjadi defisit pasokan gas di Jawa.

Menurut perkembangan kebutuhan gas dalam negeri terutama di Jawa terus mengalami peningkatan. Tahun lalu permintaan gas di Jawa mencapai 2.406 juta MMscfd.

Sedangkan di sisi lain pasokan hanya 973 MMscfd, yang berarti telah terjadi defisit sekitar 1.433 MMscfd.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 2										TAHUN 2006	

Lelang 21 Blok Migas Sepi

LELANG penawaran langsung 21 blok minyak dan gas (migas) kurang peminat. Investor yang meminati Blok Situbondo bahkan tidak memasukkan dokumen penawaran sehingga proses lelang untuk blok itu tidak dilanjutkan. Direktur Jenderal Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso mengungkapkan hal itu, kemarin. Menurut Luluk, pemasukan dokumen penawaran untuk ke-21 blok migas ditutup Rabu (11/10) pukul 14.30 WIB sejak dibuka pada 28 Agustus 2006. Laporan rekapitulasi menunjukkan sebanyak empat blok masing-masing mendapat masukan dokumen penawaran dari dua perusahaan/konsorsium. Untuk satu blok, yaitu Blok Situbondo, tidak ada satu pun dokumen yang masuk. Sisanya hanya satu dokumen untuk setiap blok. (Ndy/E-3)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 77

TAHUN 2006

ExxonMobil masih bisa garap Natuna D-Alpha

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral masih membuka kesempatan kepada ExxonMobil untuk pengembangan Natuna D-Alpha di Kepulauan Riau.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yudiantoro menegaskan saat ini pihaknya sedang mencermati aspek legalnya.

"Kami masih melihat masalah legal, kontraknya sudah selesai. Tapi kami pahami tidak bisa langsung kami putus dan masih terbuka terhadap usulan-usulan. Kami ini sekarang cukup fleksibel," ujar Purnomo, kemarin.

Dia mengatakan sudah menyampaikan sikap pemerintah tersebut saat bertemu Exxon-

Mobil di sela-sela kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Amerika Serikat.

Di sisi lain Purnomo meyakini persoalan kontrak ExxonMobil tidak akan memberi sinyal negatif terhadap investasi di Tanah Air.

Dia mengatakan pihaknya hanya menghormati kontrak. "Kami kan tidak memilih apakah itu Exxon mobil atau investasi yang lain. Kan ada aturan kontrak. Terhadap Exxon di Cepu kita fair."

Sebelumnya Purnomo menyatakan kontrak Exxon di Natuna D-Alpha sudah berakhir. Pasalnya perusahaan asal AS itu tidak bisa memasukkan komitmen pengembangan Natuna D-Alpha disertai komersialisasi gas pada 2005, saat kon-

trak berakhir.

Sementara itu, 16 perusahaan dipastikan akan mendapat blok migas baru melalui penawaran langsung 21 blok migas karena hanya ada satu peminat untuk masing-masing blok tersebut.

Sedangkan empat blok dalam tender penawaran langsung itu diminati oleh lebih dari dua perusahaan dan satu blok yaitu Blok Situbondo tidak diminati sama sekali oleh calon kontraktor migas.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso usai menghadiri Raker Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo dengan Komisi VII DPR, kemarin. (08/BAMBANG DWI DJANUARTO)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN: 7										TAHUN 2006	

KONVERSI MINYAK TANAH

Rencana Impor Tabung Elpiji Ditumpangi Kepentingan Pejabat

JAKARTA (Suara Karya): Rencana impor tabung gas dari China diindikasikan memiliki latar belakang tertentu, karena langkah ini sangat mungkin ditumpangi kepentingan pejabat yang ingin mencari untung. Isyarat adanya kepentingan pejabat ini, disampaikan langsung Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris.

"Ada permainan tertentu dari segelintir pejabat demi keuntungan pribadi," kata Menperin Fahmi Idris, di Arena Pameran Produk Ekspor 2006, Rabu (11/10).

Karena itu, menurut Fahmi, pihaknya akan melakukan protes keras adanya rencana impor, karena produsen dalam negeri masih mampu memenuhi kebutuhan pasokan tabung gas yang diperlukan dalam rangka konversi minyak tanah ke gas.

"Saya protes keras jika masih ada impor tabung gas, saat ini banyak pejabat kita yang tidak probisnis, tidak pro produksi dalam negeri," katanya menegaskan.

Tindakan impor ini, lanjut Fahmi,

berbahaya karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu dalam waktu dekat, pihaknya akan mengagendakan pembicaraan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dan ajaran Pertamina untuk menyele-



"Saya khawatirkan impor itu ada komisinya. Komisi itu yang diincar pejabat yang mengizinkan adanya impor."

Fahmi Idris
Menperin

saikan hal ini.

Fahmi pun menyatakan kekhawatiran akan dimanfaatkannya kebijakan impor tabung gas itu oleh segelintir pejabat tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. "Saya khawatirkan impor itu ada komisinya. Komisi itu yang diincar pejabat yang

mengizinkan adanya impor," katanya dengan nada keras.

Ia menambahkan, pihaknya optimis kapasitas produksi pabrikan tabung gas dalam negeri masih bisa memenuhi permintaan Pertamina sebesar 800 ribu tabung gas ukuran 3 kg hingga akhir 2006. Menurutnya, lebih baik pemerintah memberikan kepercayaan kepada pabrikan dalam negeri untuk memasok kebutuhan tabung gas itu daripada harus impor.

Dengan memberikan kesempatan kepada pabrikan dalam negeri, menurutnya, selain akan meningkatkan daya saing produk tabung gas dalam negeri, juga akan meningkatkan perekonomian pengusaha lokal.

Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Industri Tabung Baja (Asitab) Tjitadi mengatakan meski sudah mengemukakan marginnya dengan penawaran Rp 90 ribu per unit, namun Pertamina masih menyatakan harga itu kemahalan dan minta harga ditekan lagi.

Pertamina melihat harga jual tabung Cina FOB 5,8 dolar AS per ton plus bea masuk 15 persen sehingga harga jual tabung Cina mencapai Rp 69 ribu. "Produsen dalam negeri jadi maju mundur ikut tender karena harga. Pertamina mengatakan kemungkinan besar penunjukan langsung dengan harga nego," kata Tjitiadi.

(Joko Sriyono)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 119

TAHUN 2006

Panitia Anggaran Tolak Bayar Karaha Bodas

JAKARTA — Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menolak jika pembayaran klaim Karaha Bodas Company diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis mengatakan pihak yang harus membayar adalah PT Pertamina (Persero).

"Kami menolak jika pembayaran klaim menggunakan APBN karena itu merupakan urusan bisnis dan bukan tanggung jawab pemerintah," kata Emir kepada *Tempo* kemarin.

Menurut Emir, mekanisme penyelesaian secara bisnis sudah ditetapkan oleh arbitrase internasional. Dia menambahkan, putusan arbitrase mempersalahkan Pertamina dan bukan pemerintah. "Persoalannya adalah *business to business* dan bukan antarpemerintah," katanya.

Hingga kini, berdasarkan putusan arbitrase dan pengadilan di Amerika Serikat, aset Pertamina di negara itu sudah dibekukan. "Aset itu akan disita jika Pertamina tidak membayar," ujarnya.

Jika Pertamina berkeberatan dengan pembayaran tersebut, kata Emir, perusahaan itu harus menyampaikan argumentasinya. "Silakan Pertamina membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan kami bahas kalau sudah ada putusan pengadilan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Ari Sumarno menolak membayar klaim Karaha Bodas Company karena keputusan pembatalan proyek dilakukan pemerintah. "Yang menghentikan proyek itu siapa? Itu harus dicari jalan keluarnya," ujarnya.

Ari mengatakan akan ada pembahasan dengan pemerintah mengenai siapa yang harus membayar. Sebab, kasus gugatan Karaha Bodas Company akibat keputusan pihak ketiga, yakni pemerintah. "Jangan Pertamina yang dibebani semua, doing," katanya.

Menurut Ari, putusan Mahkamah Agung Amerika mengharuskan klaim Karaha Bodas Company dibayar. Jika tidak dibayar, aset Pertamina, kata dia, terancam disita.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 6		TAHUN 2006

Pertamina Minta Bahas dengan Pemerintah Soal KBC

Jakarta-Mengenai kasus Karaha Bodas Company (KBC), PT Pertamina (Persero) akan meminta pembahasan lagi dengan pemerintah. Sebelumnya Mahkamah Agung di New York, Amerika Serikat (MA AS) telah memutuskan Pertamina dan PLN membayar kerugian KBC.

"Yang menghentikan proyek itu siapa? Kenapa Pertamina disuruh bayar? Itu harus dicari jalan keluarnya, harus dibahas lagi dengan pemerintah. Itu kan akibat dari keputusan pihak ketiga. Ini keputusan regulator atau pengawas, kalau kita harus memenuhi yang ini, ya kita keberatan," kata Direktur Utama Pertamina Ari H Soemarno di sela-sela rapat kerja dengan Komisi VII di DPR, Selasa (10/10) siang.

Ari juga menyebutkan pihaknya berupaya menemuk-puh jalur hukum melalui Caymant Island. Oleh karena itu, tambahnya, MA AS telah menyetujui menanggihkan sementara kewajiban pembayaran tersebut.

"Kita sedang menimbang bisa tidaknya upaya hukum. Soalnya masalahnya sudah diputuskan MA AS, mau bagaimana lagi? Sanksi pidana tidak ada arti apa-apa

bagi AS, karena itu keputusan pengadilan perdata. Kalau itu tidak membayar, yang repot Pertamina," tambah Ari.

Ia mengkhawatirkan nanti aset Pertamina di luar negeri dibekukan, sehingga tidak bisa beroperasi di luar negeri. Ari juga khawatir minyak atau LNG yang dikirim ke luar negeri nanti disita.

"Kita lihat lagi nanti sebenarnya yang bertanggung jawab siapa. Pertamina minta ketegasan dari semua. Jangan Pertamina dibebani semua, dong," tegas Ari.

Ia mengakui uang yang dibekukan itu merupakan uang masuk dari hasil penjualan LNG. Menurutnya, hasil penjualan LNG semua milik pemerintah, bukan Pertamina.

"Memang masuk account-nya Pertamina karena Pertamina kan sebagai penjual, masuk rekening penampungan. Tapi dana itu sebetulnya bukan hak Pertamina. Haknya itu harus masuk ke negara, harus ditransfer ke negara. Tapi kalau itu tidak diakui, bahwa yang bayar harus pemerintah, kan lucu juga, yang menghentikan bukan Pertamina," lanjut Ari. (mega christina)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

Ekspor Gas Topang Ekonomi Myanmar

BANGKOK — Sebuah laporan Dana Moneter Internasional (IMF), menyatakan, kenaikan ekspor gas telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Myanmar. Dengan demikian, gas telah menolong negeri yang tergolong salah satu termiskin di dunia tersebut.

Laporan itu sendiri kemudian dikutip koran terbitan Inggris, *Financial Times*, kemarin (11/10). Mengutip laporan IMF, *Financial Times* menyatakan, pertumbuhan ekonomi di Myanmar akan mencapai 7,0 persen di tahun fiskal 2006/2007, naik dari 4,5 hingga 5,5 persen dalam beberapa

tahun terakhir. "Meski demikian, laporan itu juga menemukan bahwa prospek jangka panjang negara ini dipengaruhi oleh inflasi tinggi dan kebijakan ekonomi yang sulit diprediksi," kata *Financial*.

Myanmar adalah salah satu dari negara-negara yang tergolong paling miskin di dunia. Myanmar juga terkena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa, karena tuduhan pelanggaran HAM dan mengenakan tahanan rumah kepada pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi.

Namun dampak dari sanksi itu sendiri melemah dengan adanya campur tangan Cina, India dan Thailand yang tampaknya ingin berperan di Myanmar. ■ afp

53

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2006

Pemerintah Jajaki Impor Gas Iran

JAKARTA — Kekurangan pasokan gas yang kerap terjadi di Indonesia coba diatasi pemerintah. Saat ini pemerintah tengah menjajaki impor gas dari Iran untuk menutupi kekurangan pasokan gas tersebut.

Negosiasi pembelian gas dari Iran itu masih dilakukan antara kedua pemerintah. "Kami sedang diskusikan soal gas, Iran merupakan penghasil gas terbesar di dunia," ujar Duta Besar Iran untuk Indonesia,

Behruz Kamal Vandii, usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Rabu (11/10).

Iran memang sedang mencari pangsa pasar gas baru di kawasan Asia. Menurut Behruz, sebagian besar kebutuhan gas untuk Indonesia itu digunakan untuk pembangkit energi. Namun ia belum memastikan bentuk kerja sama pasokan gas seperti apa yang akan disepakati kedua negara lantaran masih didiskusikan. "Ini jadi poin pembicaraan dengan Wapres."

Selain membicarakan kemungkinan impor gas ke Indonesia, Behruz membicarakan rencana kunjungan Wapres ke Iran. Wapres ingin menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Iran. ■ djo

55

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

TENDER BLOK MIGAS Blok Situbondo Tidak Diminati

JAKARTA (Suara Karya): Pemasukan dokumen penawaran dalam tender 21 wilayah kerja (WK) migas melalui mekanisme penawaran langsung (*direct offer*) sepi peminat. Umumnya setiap WK migas hanya diminati oleh satu peminat, bahkan WK Situbondo sama sekali tidak diminati investor.

Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Luluk Sumiarso mengatakan, sebanyak 20 WK diminati investor bahkan terdapat empat WK yang diminati dua investor. "Penutupan pemasukan pada pukul 14.30 WIB, WK Situbondo sama sekali

tidak diminati," kata Luluk usai rapat kerja dengan Komisi VII di Jakarta, Rabu (11/10). Evaluasi akan dilakukan selama tiga minggu dan akan langsung diperoleh pemenang.

Menurut dia, meski hanya satu peminat, belum tentu hak/kesempatan pertama untuk memiliki (*first right refusal*) berlaku pada investor yang memasukkan dokumen.

Dia menjelaskan, mekanisme *direct offer* tidak bisa diartikan sebagai penunjukkan langsung.

Ke-21 WK itu antara lain, WK Duyung di lepas pantai Natuna, WK Pari di lepas pantai Natuna, WK Tonga di daratan Sumatera

Utara, WK Lemang di daratan Sumatera Tengah, WK Batu Gajah di daratan Sumatera Tengah, dan WK Batanghari di daratan Sumatera Tengah. (Abdul Choir)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA					<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																									
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI			<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 14											TAHUN 2006																			

Menperin Jamin Pasokan Gas Industri Pupuk

JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin), Fahmi Idris, memastikan mulai awal 2007 mendatang ketersediaan pasokan gas bagi industri pupuk di dalam negeri tidak akan mengalami kendala. Pasokan gas tersebut akan dapat terpenuhi dari wilayah Sumatera, Jawa Timur, dan Utara Jawa.

Dijelaskan Menperin, pada akhir tahun 2006 industri yang berada di wilayah Jawa Barat bagian Utara dan Selatan, termasuk juga pabrik pupuk, akan mendapatkan pasokan gas dari Jambi.

Sedangkan untuk industri yang berada di wilayah Jawa Timur, sambungnya, akan mendapatkan pasokan gas dari Santos (Madura Offshore) Pty.Ltd.

"Kalau suplai seluruhnya lancar, saya optimistis awal 2007 kebutuhan gas untuk pabrik pupuk dapat terpenuhi," ujarnya. Selain itu, tambahnya, industri di dalam negeri juga akan mendapatkan tambahan pasokan gas dari BP Indonesia.

Sementara mengenai rencana salah satu produsen pupuk dalam negeri yang akan mengekspor stok pupuk mereka, Fahmi menuturkan hal tersebut tidak dibenarkan. Produsen pupuk, lanjutnya, harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk ekspor.

"Kebutuhan (pupuk) dalam negeri masih sangat besar, jadi tidak diperkenankan untuk ekspor," tandasnya. ■ dia

57

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																											
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : (1)											TAHUN 2006																			

Perbaiki Kontrak Natuna

Pemerintah Ingin Porsi Bagi Hasil Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan akan memperbaiki porsi bagi hasil dalam kontrak kerja sama Blok Natuna D Alfa dengan ExxonMobil. Agar gas dari blok tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan pasar domestik, terutama kawasan ekonomi khusus Batam dan Bintan, terbuka peluang untuk perbaikan harga gas.

Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Rabu (11/10). Perubahan sejumlah persyaratan yang terkait dengan kontrak Natuna dibahas dalam rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres semalam. Rapat itu menindaklanjuti pertemuan Wapres dengan pihak ExxonMobil di Washington, akhir September lalu.

"Intinya kita ingin ada perbaikan, termasuk porsi bagi hasil," ujar Purnomo.

Purnomo mengatakan, pemerintah tidak bermaksud menekan ExxonMobil agar ada perusahaan lain yang masuk. Dalam kontrak kerja sama perpanjangan Natuna yang diteken tahun 1995, porsi bagi hasil antara ExxonMobil dan pemerintah adalah 100:0. Rasio itu diberlakukan dengan pertim-

bangkan kondisi cadangan gas di blok tersebut sulit untuk dikembangkan karena kandungan CO₂ dan sulfur yang tinggi. Untuk mengembangkan blok dengan perkiraan cadangan gas mencapai 46 triliun kaki kubik tersebut, dibutuhkan dana sampai 40 miliar dollar AS.

Dengan penyertaan modal 76 persen, ExxonMobil menjadi operator Blok Natuna. Mitranya adalah Pertamina yang memiliki penyertaan modal 24 persen. Selama 11 tahun tidak ada kegiatan eksploitasi.

Sampai saat ini masih terjadi perbedaan prinsip antara pemerintah dan ExxonMobil mengenai nasib kontrak Natuna. Pemerintah menilai kontrak Natuna yang diberi batas sampai tahun 2005 sudah habis. Hal itu disebabkan ExxonMobil dianggap tidak

mampu memenuhi syarat komersial pengembangan blok maupun studi kelayakan.

"Waktu mereka minta perpanjangan, kami tanyakan studi kelayakannya. Tentu itu harus disetujui dulu baru bisa dianggap diperpanjang, tidak cukup hanya tunjukkan sudah ada MOU untuk penjualan gasnya," kata Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Kardaya Warnika.

Menurut Kardaya, kalau pun ExxonMobil ingin melanjutkan dengan kontrak baru, harus dilihat apakah ada perbaikan kontrak yang lebih menguntungkan pemerintah. "Kontrak yang lama itu sangat tidak bagus," ujarnya.

Sementara itu, pihak ExxonMobil beranggapan mereka sudah memenuhi ketentuan dalam kontrak dengan memasukkan surat pernyataan komitmen untuk mengembangkan Natuna. Selebar surat itu dikirimkan kepada BP Migas pada tahun 2004.

Pada 1 Juni 2006 ExxonMobil bersama-sama Pertamina mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menyampaikan bahwa mereka sedang dalam pembicaraan se-

rius dengan sejumlah pembeli potensial, termasuk Petronas. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Pertamina dan ExxonMobil bersedia menjual sebagian sahamnya di Natuna ke Petronas sebagai barter penjualan gas ke perusahaan Malaysia itu.

Pengamat gas Ramses Hutapea mengatakan, keputusan pemerintah menegosiasi ulang kontrak tersebut sangat tepat. "Pemerintah harus tegas, jangan sampai jadi Cepu kedua," kata Ramses.

Harga gas

Agar Blok Natuna tetap ekonomis untuk dikembangkan, pemerintah mempertimbangkan perbaikan harga gas di daerah Kepulauan Riau. Dengan cadangan yang sangat besar, daerah Batam dan Bintan tidak perlu khawatir tidak kebagian. Namun, pengembangan Natuna perlu diberi insentif lebih mengingat harga jual gas ke Singapura dan Malaysia jauh lebih tinggi.

Harga gas domestik di Batam dan Bintan saat ini sekitar 3,5 dollar AS per MMBTU. Purnomo mengatakan tidak masalah jika harga dinaikkan sampai 5 dollar AS per MMBTU. (DOT)

58

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA		<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 14										TAHUN 2006																				

Pemanfaatan Gas untuk Domestik Serap Tenaga Kerja Lebih Banyak

JAKARTA — Pemanfaatan produksi gas di dalam negeri akan memberi nilai tambah 20 kali lipat dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini juga akan mendorong tumbuhnya industri di berbagai daerah, terutama daerah terdekat dengan sumber gas tersebut.

"Penggunaan gas untuk kebutuhan industri di dalam negeri akan menyerap sampai 20 kali lipat tenaga kerja lebih besar dibandingkan gas hanya diproduksi sebagai LNG untuk ekspor," kata Dirjen Industri Agro dan Kimia (IAK) Deperin Benny

Wahyudi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan berdasarkan kajian pihaknya yang tertuang dalam *Master Plan* (rencana besar) Kebutuhan Industri untuk Sektor Industri pemanfaatan gas untuk bahan baku industri akan meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Dalam rencana besar yang disusun Deperin itu, diperbandingkan tenaga kerja langsung yang diserap produksi LNG untuk satu train yang setara dengan 250 mmscfd hanya menyerap 250 tenaga kerja atau setara de-

ngan satu orang per mmscfd. Bila gas dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri terutama amonia, urea, dan metanol, maka akan terserap tenaga kerja lebih banyak.

Perhitungan Deperin, untuk produksi amonia sebesar 1.000 ton per hari dengan kebutuhan gas setara 35 mmscfd mampu mempekerjakan 300 orang atau setara 8,6 orang per mmscfd.

Sama dengan amonia, produksi metanol 3000 ton per hari dengan kebutuhan gas setara 35 mmscfd mampu mempekerjakan 300

orang atau setara dengan 8,6 orang per mmscfd.

Lebih besar lagi penyerapan tenaga kerjanya di industri pupuk urea yang dengan produksi sebesar 1.750 ton per hari — termasuk amonia — dan kebutuhan gasnya setara 25 mmscfd, mampu menyerap 500 orang atau setara dengan 20 orang per mmscfd.

Selain itu, nilai tambah lainnya, kata Benny, juga bisa dinikmati bila gas diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk tersebut.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mendukung penggunaan gas untuk dalam negeri karena akan menyebabkan efek berantai yang lebih besar baik pembukaan lapangan kerja baru maupun penyerapan tenaga kerja. "Kalau kegiatan produksi di Indonesia sudah gas *minded* maka hal itu bisa menurunkan biaya produksi dibandingkan penggunaan BBM. Kalau biaya sudah berhasil ditekan, maka daya saing akan meningkat," katanya.

Djimanto memperkirakan penggunaan gas untuk kegiatan produksi di dalam negeri akan memberi nilai tambah lima kali lebih besar dibandingkan ekspor LNG.

■ ant/dia

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

Kebutuhan Minyak Dunia Naik 1,2 Persen

PARIS — Badan Energi Internasional (IEA), kemarin (11/10) memperkirakan, permintaan minyak dunia tahun ini diprediksi naik 1,2 persen. Dengan demikian, kebutuhan tahun ini menjadi menjadi 84,6 juta barel per hari, dan diprediksi akan naik 1,7 persen pada 2007 menjadi 86 juta barel per hari.

Data itu sedikit di bawah proyeksi

IEA sebelumnya, yang memperkirakan kenaikan permintaan tahun ini sebesar 1,3 persen. Sedang untuk 2007, sebelumnya IEA memperkirakan naik 1,8 persen.

IEA menyatakan, turunnya kenaikan kebutuhan minyak dunia di bawah prediksi sebelumnya itu diakibatkan banyak hal. Sempat tingginya harga minyak dunia, cuaca yang ramah, serta rendahnya harga gas alam, disebut-sebut menjadi salah satu penyebabnya. Sebelumnya, kalangan minyak dunia, termasuk IEA, memperkirakan akan adanya faktor cuaca yang buruk, sedikitnya ketersediaan pasokan dan beberapa hal lain, yang membuat mereka memprediksi lebih tinggi, sebelumnya. ■ atp

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

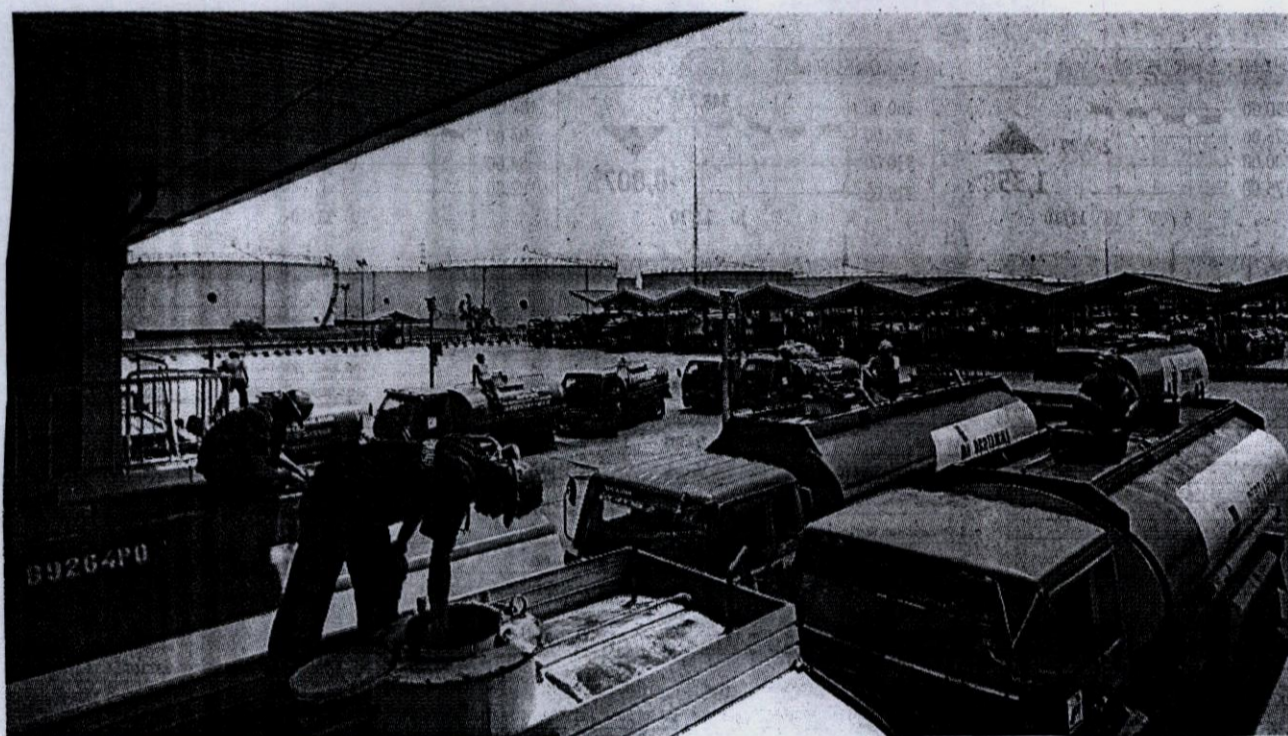
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (12) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2006



Aktivitas
pengisian
bahan bakar
minyak di
Unit
Pemasaran
Pertamina III,
Plumpang,
Jakarta, Rabu
(11/10).
Kebutuhan
harian BBM
pada
September
2006 sebesar
181.900
kiloliter per
hari.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 118

TAHUN 2006

Pemerintah Ingin Kontrak Baru di Blok Natuna

Proses negosiasi harus dimulai dari awal.

JAKARTA Pemerintah menginginkan kontrak baru untuk pengelolaan Blok Natuna D-Alpha di Kepulauan Riau. Sebab, pemerintah berkukuh kontrak dengan ExxonMobil Oil Indonesia berakhir pada 9 Januari 2007.

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kardaya Warnika menegaskan Exxon tidak memenuhi permintaan pemerintah, yakni memastikan pengembangan Blok Natuna. "Hingga saat ini Exxon belum memasukkan rencana kerja dan pendanaan," ujarnya kepada *Tempo*, Selasa lalu.

Kardaya menjelaskan, jika ExxonMobil tetap *ngotot* dan ingin kembali mengembangkan blok ter-

sebut, harus dibuat kontrak baru dan proses negosiasi kembali dari awal. "Artinya, kontrak lama telah berakhir dan diganti dengan kontrak baru," ujarnya.

Menurut dia, kontrak ExxonMobil di Natuna berakhir pada 9 Januari 2005. Namun, ExxonMobil mempunyai waktu dua tahun sejak kontrak berakhir untuk meneruskan kegiatannya untuk memastikan keekonomian dari pengembangan Blok Natuna dengan syarat membuat komitmen untuk *development expenditure*. "Tapi, kalau tidak memasukkan komitmen, kontrak otomatis tidak berlanjut," katanya.

Seperti diberitakan, pemerintah

memastikan kontrak pengembangan Blok Natuna, yang ditandatangani pada 1995, akan berakhir pada 2007.

Namun, dalam pertemuan dengan Jusuf Kalla, Selasa lalu, International Senior Advisor Asia Pacific ExxonMobil Corporation Robert W. Haines tetap berkeras kontrak tidak akan berakhir pada 2007. "Menurut kami, kontraknya tetap valid (hingga 2009)," tuturnya. Haines mengatakan mereka masih terus membicarakan pengelolaan blok tersebut dengan pemerintah Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kemarin kembali menegaskan pihaknya berpedoman kontrak telah berakhir pada 2005. "Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden, saya katakan kontrak telah berakhir karena Exxon tidak bisa mengajukan komersialisasi," ujarnya.

Menurut dia, perbedaan tentang akhir masa kontrak terjadi akibat perbedaan persepsi. Exxon merasa dapat memperpanjang masa kontraknya dengan memasukkan secara tertulis surat komitmen untuk pengembangan Blok Natuna pada 17 Desember 2004. Sedangkan pemerintah menganggap itu tidak cukup karena dalam rencana pengembangan itu harus jelas siapa pembeli gas yang dihasilkan blok tersebut.

● MUHAMMAD FASABENI | OKTAMANDJAYA WIGUNA | NIEKE

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	<input checked="" type="checkbox"/>	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 14											TAHUN 2006																			

Exxon Klaim Dapat Garap Natuna Sampai 2009

JAKARTA— ExxonMobil Oil Indonesia merasa masih mempunyai hak untuk menggarap blok D Alpha Natuna. Pihak Exxon berpatokan pada *basic agreement* tahun 1995 yang ditandatangani antara pemerintah, Exxon, dan Pertamina.

"Isi dari perjanjian tersebut menyatakan setelah habis kontrak tahun 2005, diperpanjang tiap dua tahun hingga 2009," kata Humas ExxonMobil Deva Rahman di Jakarta, kemarin.

Deva menyatakan soal statement Kardaya mengenai *work program and budgeting* 2007 telah diserahkan oleh Exxon. "Saat ini kami masih menunggu *approval*-nya dari BP Migas," katanya.

Soal komersialisasi gas Natuna, Deva mengatakan, Exxon hampir mencapai kesepakatan akhir dengan PTT Thailand dan Petronas untuk penjualan gasnya. "Sehingga, diharapkan dalam waktu dekat

ketiga pihak sudah bisa menandatangani kesepakatan jual beli gas."

Deva juga menambahkan pemerintah akan memperoleh pendapatan sebesar 50 persen dari pendapatan bersih di Natuna (pajak dan bonus *fee*) atau sekitar 13-26 miliar dolar AS per tahun.

Sebelumnya Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, PT Pertamina (Persero) bisa mengambil alih kepemilikan Blok Natuna D-Alpha yang sebelumnya dikelola ExxonMobil. "Sesuai aturannya, maka kesempatan pertama pengambilalihan diberikan ke Pertamina sebagai mitra Exxon," katanya.

Menurut dia, kemungkinan Pertamina mengambil alih tersebut sedang dibahas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Dirut Pertamina Ari Hernanto Sumarno mengatakan, pihaknya memang berniat mengelola blok

tersebut. "Kami ingin Pertamina tidak dikeluarkan dari blok itu, namun sebaliknya didukung mengelolanya, supaya 66 juta dolar AS yang telah dikeluarkan bisa kembali lagi," ujarnya.

Exxon sendiri diperkirakan telah mengeluarkan dana sekitar 250 juta dolar AS. Biaya-biaya yang disebut *sunk cost* itu tidak bisa diganti, karena blok belum berproduksi. Sementara, biaya yang bisa diganti dari hasil migas disebut *cost recovery*.

Purnomo mengatakan, kontrak ExxonMobil di Natuna D-Alpha telah berakhir sejak 2005. "Kami beri batas waktu hingga 8 Januari 2007 untuk memperpanjang kontrak, namun tidak diambil Exxon," katanya.

Mengenai klaim ExxonMobil bahwa kontrak baru selesai 2009, Purnomo mengatakan, "Exxon menyatakan hanya dengan menyampaikan surat sudah cukup,

namun BP Migas menganggap tidak cukup, harus ada komitmen pengembangan sekaligus penjualannya."

Purnomo mengatakan, sikap pemerintah tersebut juga sudah disampaikan Wapres Jusuf Kalla saat bertemu petinggi ExxonMobil dalam kunjungannya ke AS beberapa waktu lalu.

Kepala BP Migas Kardaya Warnika mengatakan, Exxon bisa saja kembali mengelola Blok Natuna D-Alpha, namun harus dengan kontrak baru baik besaran kepemilikan maupun bagi hasilnya. ■ dia

Fakta Angka

250 juta dolar AS

Dana yang telah dikeluarkan ExxonMobil di Natuna.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006



Antre Minyak Tanah

Sebagian warga di Jalan Anjir Mambulau Barat, Kuala Kapuas, Kalimantan Barat antre membeli minyak tanah yang dijual Rp 2.600 per liter. Warga mengeluhkan persediaan minyak tanah di kawasan tersebut yang langka, dan hanya diperbolehkan membeli sebanyak 10 liter saja per keluarga. Foto dibuat Selasa (10/10) sore. [Pembaruan/Luther Ulag]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 6										TAHUN 2006																				

5,5 Juta Tabung Elpiji Dibagikan Gratis

[JAKARTA] Pemerintah akan membagikan 5,5 juta unit tabung elpiji isi 3 kg secara gratis. Hal ini sejalan dengan program konversi atau pengalihan penggunaan minyak tanah ke elpiji (*Liquefied Petroleum Gas/LPG*) untuk tahun 2006 dan 2007.

Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya di sela-sela rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa (10/10) membenarkan, pembagian 5,5 juta unit tabung elpiji itu merupakan keputusan pemerintah.

Untuk tahun 2006, tabung yang akan dibagikan sebanyak 347.000 unit. Sedangkan, tahun 2007 sebanyak 5,2 juta unit tabung.

Impor

Total pengadaan tabung elpiji untuk tahun 2006 mencapai 800.000 unit dan sebanyak 12 juta unit untuk 2007. Penyediaan tabung isi

ulang perlu dilakukan dengan rumusan satu tabung berbanding 2-3 tabung.

Menurut Hanung, saat ini Pertamina belum memutuskan apakah akan mengimpor tabung (isi 3 kg) tersebut atau sepenuhnya mengandalkan produksi di dalam negeri. "Kami masih menunggu kesiapan produsen dalam negeri," ujarnya.

Terkait dengan rencana impor tabung, Pertamina telah meminta kepastian 14 perusahaan di dalam negeri yang sanggup memproduksi tabung. Tetapi, sampai Desember 2006 ternyata mereka hanya mampu memproduksi sekitar 400.000 sampai 500.000 unit.

"Jadi, kami perkirakan akan impor minimal 200.000 unit tabung untuk memenuhi target 800.000 unit tabung tahun ini," tambahnya.

Harga tabung impor akan menjadi acuan bagi Pertamina dalam menentukan harga yang akan disepakati dengan produsen di dalam negeri. [H-13]

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

Pertamina Tetap Tolak Bayar KBC

[JAKARTA] Pertamina menegaskan tidak akan membayar klaim Karaha Bodas Company (KBC). "Yang menghentikan proyek itu siapa? Pemerintah kan? Kenapa

Pertamina yang harus bayar. Ini harus dicari jalan keluarnya, harus dibahas lagi dengan pemerintah," tandas Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Ari Soemarno di sela-sela rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa (10/10).

Penolakan membayar tuntutan KBC sudah ditegaskan oleh Dirut Pertamina sebelumnya, Widya Purnama. Ketika itu, Widya bersikukuh Pertamina tidak akan membayar sepeser pun klaim KBC atas pembatalan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha Bodas di Garut, Jawa Barat tersebut. Jika dipaksa untuk membayar, Widya berkata, dirinya akan memilih mundur dari jabatan Dirut Pertamina.

Ari Soemarno menjelaskan, pembatalan proyek PLTP Karaha Bodas merupakan akibat dari keputusan pihak ketiga yang berada di luar pihak-pihak yang terlibat kontrak yakni Pertamina, PLN, dan KBC. "Kalau itu keputusan Pertamina ya tanggung jawab Pertamina. Kalau keputusan PLN ya tanggung jawab PLN. Tetapi ini keputusan regulator (pemerintah). Kalau Pertamina harus menanggung, ya kami keberatan," tukasnya.

Sementara itu, Menteri



Ari Soemarno
[Foto: Dok Pembaruan]

ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan penyelesaian kasus Karaha Bodas sudah diserahkan ke korporasi melalui mekanisme *company to company*.

Proyek PLTP Karaha Bodas merupakan satu dari 27 proyek listrik swasta (*Independent Power Producer* atau IPP) yang ditangani oleh tim yang dibentuk Presiden. Pembangunan proyek pembangkit geothermal ini diteken pada 1994. Tetapi krisis ekonomi membuat pembangunan proyek dihentikan oleh pemerintah pada 1997.

Pembatalan proyek PLTP Karaha Bodas ternyata menuai masalah. Menurut Purnomo, untuk penyelesaiannya sudah disepakati bahwa Pertamina berada di depan.

Pada pekan lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat di New York memutuskan bahwa Pertamina tetap harus membayar tuntutan KBC sebesar US\$ 300 juta.

Menyikapi itu, Purnomo mengaku sejauh ini belum dilakukan koordinasi di tingkat pemerintah. "Ka-

rena, itu sepenuhnya ditangani oleh Pertamina," komentarnya.

Tidak Menyerah

Ari Soemarno mengkhawatirkan jika klaim KBC tidak dibayar maka Pertamina akan menemui masalah dalam menjalankan bisnis di tingkat global di kemudian hari.

"Kalau klaim itu tidak dibayar, yang repot Pertamina. Bagaimana kalau nanti tahu-tahu aset di luar negeri dibekukan semua? Kami tidak bisa beroperasi di luar negeri. Kalau saya kirim minyak atau LNG (gas alam cair) dan tahu-tahu disita, bagaimana," keluhnya.

Lebih lanjut Ari, yang menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam proyek Karaha Bodas, mengatakan Pertamina akan meminta ketegasan pemerintah.

Mengenai dana US\$ 30 juta yang sudah diambil oleh KBC, menurut dia, uang itu merupakan hasil penjualan LNG (*Liquefied Natural Gas*) yang menjadi milik pemerintah, bukan Pertamina.

Kendati persoalan ini pelik, Ari memastikan Pertamina tidak menyerah untuk menuntut juga pihak KBC antara lain dengan tuduhan penipuan dan penggelembungan nilai proyek melalui pengadilan di negara lain, Cayman

Island. "Kami pun sudah meminta Mahkamah Agung AS agar pelaksanaan pembayaran ditanggihkan dan aset-aset kami tidak diblokir sampai proses hukum yang kami upayakan di negara lain selesai," bebarnya. [H-13]

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			11 12 13 14 15			16 17 18 19 20		21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 7										TAHUN 2006	

Kontrak Exxon di Natuna Sudah Berakhir

[JAKARTA] Pemerintah memastikan rencana kunjungan Presiden AS George W Bush ke Indonesia tidak akan mempengaruhi sikap pemerintah terhadap status keberadaan ExxonMobil di ladang migas Natuna D-Alpha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, kontrak ExxonMobil di Blok Natuna D-Alpha telah berakhir pada 2005. Saat ini, menurut Purnomo, pemerintah memberi kesempatan kepada ExxonMobil untuk *check out* (keluar), namun tidak diberikan batas waktu kapan raksasa minyak asal AS itu harus hengkang dari Natuna.

"Karena mereka (ExxonMobil) tidak memasukkan lagi komitmen pengembangan termasuk komersialisasi pada saat batas kontrak berakhir yakni tahun 2005, maka secara otomatis kontraknya di Natuna berakhir. Silahkan saja kalau mereka beda persepsi. Tetapi kita memiliki aturan yang kuat dan ini sudah kita sampaikan kepada Exxon saat kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke AS beberapa waktu lalu," kata Purnomo di sela-sela acara buka puasa bersama

di Departemen ESDM di Jakarta, Selasa (10/10).

Ikuti BP Migas

Pemerintah, lanjut Purnomo, tengah mengkaji kepemilikan Blok Natuna, sebab ada kemungkinan itu akan diserahkan kepada Pertamina. Diakui, pemerintah memang melakukan negosiasi ulang dengan ExxonMobil untuk membuat kontrak baru. Pembicaraan dengan Exxon sangat penting mengingat saat ini Exxon bersikukuh masih memiliki kontrak Natuna hingga 2009. "Itu karena mereka beranggapan hanya dengan menyampaikan surat perpanjangan (untuk eksplorasi sampai 2009) kepada BP Migas maka sudah bisa diperpanjang kontraknya," katanya.

Padahal, BP Migas telah menolak hal itu karena yang disampaikan Exxon hanya surat permohonan perpanjangan bukan rencana pengembangan yang disertai komersialisasi dan studi kelayakan. "Jadi, kita pemerintah mengikuti BP Migas bahwa kontrak Exxon di Natuna habis tahun 2005," tandas Purnomo.

Sebelumnya Purnomo

mengatakan, kontrak Exxon di Natuna diberi toleransi hingga 8 Januari 2007. Namun, kemarin dia menegaskan, "Itu maksudnya, waktu yang kita berikan untuk *check out*."

Secara terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari H Soemarno mengatakan, siapa pun yang akan ditunjuk mengembangkan Natuna, Pertamina ingin tetap dilibatkan menggarap ladang yang memiliki potensi cadangan gas cukup besar itu. Saat ini, lanjutnya, dari total investasi yang dikeluarkan di Blok Natuna sebesar US\$ 250 juta, sekitar US\$ 60 juta merupakan investasi Pertamina.

"Sebab kita punya 24 persen di sana. Jika Pertamina tidak melanjutkan eksplorasi di Natuna, uang yang ditanam itu akan hilang. Oleh karena itu, kita ingin tetap menggarap Natuna. Potensi gas di blok itu cukup besar tetapi perlu investasi yang besar untuk bisa menghasilkan gas karena Blok Natuna berada di wilayah yang memiliki risiko dan tingkat kesulitan tinggi. Kira-kira perlu US\$ 4 miliar untuk menggarap blok itu," katanya. [H-13]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																																												
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN: 6										TAHUN 2006																																			

Pertamina Impor 200.000 Tabung Gas

Jakarta - PT Pertamina (Persero) untuk sementara memutuskan impor 200.000 tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram. Ini berkaitan dengan target konversi minyak tanah ke elpiji yakni 800.000 tabung gas pada akhir tahun 2006 ini.

"Kita tidak pernah akan mengimpor kalau dalam negeri cukup," tegas Deputi Direktur Pemasaran dan

Niaga Pertamina Hanung Budyta sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII di DPR, Selasa (10/10) siang.

Menurutnya, setelah verifikasi dari 14 peserta tender produsen tabung elpiji, dalam negeri hanya sanggup memproduksi 400.000-500.000 tabung. Ia menegaskan pihaknya akan mencari harga semurah mungkin

dan proses tender impor tabung gas elpiji itu paling lama dua minggu.

Sementara itu, lanjutnya, mulai Januari 2007 pihaknya menargetkan satu juta unit tabung elpiji, sehingga minimal tercapai 12 juta tabung. Hanung menandaskan kalau dua tahap target tidak akan tercapai, pihaknya akan mempunyai program ketat.

(mega christina)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

Exxon Boleh Kelola Lagi Natuna D-Alpha

JAKARTA (SINDO) – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyatakan ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) dan PT Pertamina (persero) boleh kembali menguasai Blok Natuna D-Alpha setelah kontraknya secara resmi berakhir pada 2005. Baik Exxon maupun Pertamina dipersilakan mengajukan kembali *term and condition* yang lebih baik kepada pemerintah untuk bisa kembali berkuasa di blok tersebut dalam bentuk kontrak baru.

"Kontrak baru mungkin saja karena kontrak lama tidak bisa dilewati. Kalau ternyata dalam kajian-kajian Exxon ternyata memberikan penerimaan yang paling baik bagi negara ya pilihannya ke Exxon lagi," ungkap Kepala BP Migas Kardaya Warnika di Jakarta, kemarin.

Menurut Kardaya, Blok Natuna D-Alpha sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. BP Migas sudah menerima beberapa perusahaan migas terkemuka dari Eropa dan Amerika yang menyatakan keinginan untuk mengembangkan blok tersebut. Bahkan, kata dia, ada juga perusahaan migas lokal yang telah menyatakan minatnya atas blok tersebut. (ahmad senoadi)

69

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2006

Direct Offer 21 WK Migas Sepi Peminat

JAKARTA (SINDO) - Pemasukan dokumen penawaran pada tender 21 wilayah kerja (WK) migas melalui mekanisme penawaran langsung (*direct offer*) sepi peminat. Setiap WK migas umumnya hanya diminati satu peminat.

"Penutupan pemasukan pada pukul 14.30 WIB hari ini (kemarin, Red). Wilayah kerja Situbondo malah sama sekali tidak diminati," ungkap Dirjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso sesuai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, dari 21 WK yang ditawarkan, 20 WK diminati investor dan dari jumlah itu hanya tiga WK yang diminati lebih dari satu investor. Namun, Luluk tidak bersedia membeberkan nama-nama perusahaan besar yang telah memasukkan dokumen penawaran dan nama-nama WK yang diminati lebih dari satu investor.

Namun, Direktur Bina Usaha Hulu Migas Departemen ESDM R Priyono yang dihubungi secara terpisah membenarkan bahwa salah satu WK yang ditawarkan, yaitu WK Situbondo, tidak di-

minati investor. Menurut dia, dari semua dokumen yang masuk, ada sembilan perusahaan internasional dan sisanya perusahaan nasional yang ikut serta. Perusahaan asing yang memasukkan dokumen di antaranya ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron, Premier, dan Yapex.

Menurut dia, WK yang terbanyak diminati berlokasi di Sumatra Selatan. Priyono juga menjelaskan, ada beberapa perusahaan asing yang berminat pada WK yang tergolong daerah baru (*frontier*). Beberapa perusahaan asing yang melakukan *joint study* untuk daerah *frontier* menurut dia adalah Total, Eni, ConocoPhillips, CNOOC, dan Hess untuk daerah Masela. Menurut Priyono, dari tender ini diharapkan ada penerimaan bonus sebesar lebih dari USD21 juta.

Lebih lanjut, mengenai proses tender, Luluk mengatakan bahwa setelah masa pemasukan dokumen, ada masa evaluasi selama tiga minggu dan diharapkan setelahnya langsung diperoleh nama-nama pemenang. Namun, imbuh Luluk, meski untuk beberapa WK hanya ada satu peminat, belum tentu calon investor memperoleh kesempatan pertama untuk memiliki WK tersebut atau memperoleh hak *first right refusal*.

"Belum tentu. Dia (investor, Red) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan seperti *joint study* dan sebagainya," tutur dia. (ahmad senoadi)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006

Impor Tabung Dinilai Rawan

JAKARTA (SINDO) - Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris menilai rencana impor tabung gas berkapasitas 3 kg oleh PT Pertamina (persero) untuk program konversi minyak tanah ke elpiji membuka peluang terjadinya penyelewengan. Fahmi khawatir rencana impor itu dimanfaatkan sejumlah oknum untuk keuntungan pribadi.

"Saya khawatirkan impor itu ada komisinya. Komisi impor. Itu yang diincar pejabat yang mengizinkan impor," ujarnya di sela-sela pembukaan Pameran Produk Ekspor (PPE) di Arena Pekan Raya Jakarta, kemarin.

Terlepas dari itu, Fahmi menilai rencana impor itu pun tidak berpihak pada pengembangan industri di dalam negeri. "Saya protes keras jika masih ada impor tabung gas, saat ini banyak pejabat kitayang tidak pro bisnis, tidak pro produksi dalam negeri," tegasnya.

Untuk itu, fahmi mengatakan akan segera mengagendakan pembicaraan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) dan serta jajaran manajemen Pertamina. Tindakan impor ini, kata dia, sangat berbahaya karena bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, ia pun optimistis kapasitas produksi pabrikan tabung gas dalam negeri masih bisa memenuhi permintaan Pertamina, sebesar 800.000 tabung gas hingga akhir 2006.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina berencana mengimpor 200.000 tabung elpiji ukuran 3 kg dari China untuk proyek konversi minyak tanah ke elpiji. Pasalnya, dari kajian yang dilakukan BUMN migas tersebut terhadap kesiapan produsen tabung baja dalam negeri, kemampuan domestik hingga akhir 2006 hanya 650.000 unit tabung.

Para produsen tabung yang tergabung dalam Asosiasi Tabung Baja (Asitab) menyatakan tenggat waktu yang diberikan terlalu sempit. Pasalnya, mereka harus melakukan investasi baru guna

memproduksi tabung gas berkapasitas 3 kg karena selama ini umumnya hanya memproduksi tabung gas ukuran besar. Tak hanya itu, Asitab pun keberatan dengan harga yang dipatok Pertamina.

Ketua Asitab Tjiptadi yang dihubungi SINDO tadi malam menegaskan bahwa industri tabung nasional mampu menyuplai 800.000 unit tabung sampai akhir 2006 dengan syarat Pertamina mengumumkan patokan harga per tabungnya jauh hari. Kepastian harga, tegas dia, sangat diperlukan karena industri tabung belum bisa memperkirakan apakah pengadaan tabung itu menguntungkan atau tidak.

"Selama ini banyak industri kecil yang ragu-ragu ingin berinvestasi karena belum tahu apakah mendapatkan untung atau tidak," ungkapnya.

Tjiptadi menjelaskan, patokan yang di tetapkan Pertamina untuk tabung impor USD5,8 per tabung. Jika dihitung ongkos kirim dan bea masuk 15%, maka Pertamina akan membayar

Rp77.000 per tabung di tempat penerimanaan. Harga itu menurut dia sangat rendah bagi industri kecil.

"Kalau Pertamina berani Rp90.000 per tabung dan mengumumkan sebelumnya kita sanggup menyuplai 800.000 tabung hingga akhir tahun 2006," cetusnya.

Sementara itu, menanggapi kekhawatiran Depperin, Kadiv Humas Pertamina Toharso mengatakan pihaknya meminta semua pihak saling menghargai dan menghormati tugas dan kewajiban masing-masing. Pertamina maupun Depperin, kata dia, diharapkan tidak saling menyalahkan karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah.

"Masing-masing pihak harusnya memberikan berita yang menyejukkan, jangan dengan berita yang belum tentu benar," katanya saat dihubungi SINDO, semalam.

Toharso menyebutkan, Pertamina siap menuntaskan tuduhan Depperin jika departemen tersebut memiliki bukti bahwa

terjadi kolusi pada pengadaan tabung melalui impor. Pertamina pun siap dilaporkan kepada kepolisian maupun aparat hukum jika ada bukti yang kuat bahwa terjadi kolusi dalam pengadaan tabung tersebut.

"Tidak ada kolusi di Pertamina, jajaran direksi dan pegawai Pertamina sudah berkomitmen untuk melaksanakan transformasi disegala bidang. Buktikan kalau ada, kita akan tangkap," tandas Toharso.

Lebih lanjut, Toharso menegaskan bahwa Pertamina menyesalkan kekhawatiran berlebihan dari Depperin yang kemudian melayangkan tuduhan adanya kolusi. Tuduhan tanpa bukti menurut dia akan merusak upaya Pertamina untuk memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat. Saat ini, kata dia, jajaran Pertamina tengah melakukan upaya keras untuk melaksanakan transformasi di segala bidang dan bekerja keras untuk mewujudkannya. "Kalau begini kami tercoreng terus," ujarnya.

(ahmad senoadi/sudarsono).

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 8										TAHUN 2006																				

**Vietnam
Naikkan Pajak
Impor Bensin**

■ HANOI – Kementerian Keuangan Vietnam mulai 9 Oktober menaikkan pajak impor bensin dari 15 menjadi 20 persen. Kebijakan baru yang ditandatangani Wakil Menteri Keuangan, Truong Chi Trung, memberlakukan kenaikan pajak impor menjadi 20 persen untuk bensin tanpa timbal, bensin timbal, *solvent*, bahan bakar turbin dan pelumas. Pada 25 September, kementerian menaikkan pajak impor sejumlah produk minyak dari 10 persen menjadi 15 persen.

(ant/vna)

72

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

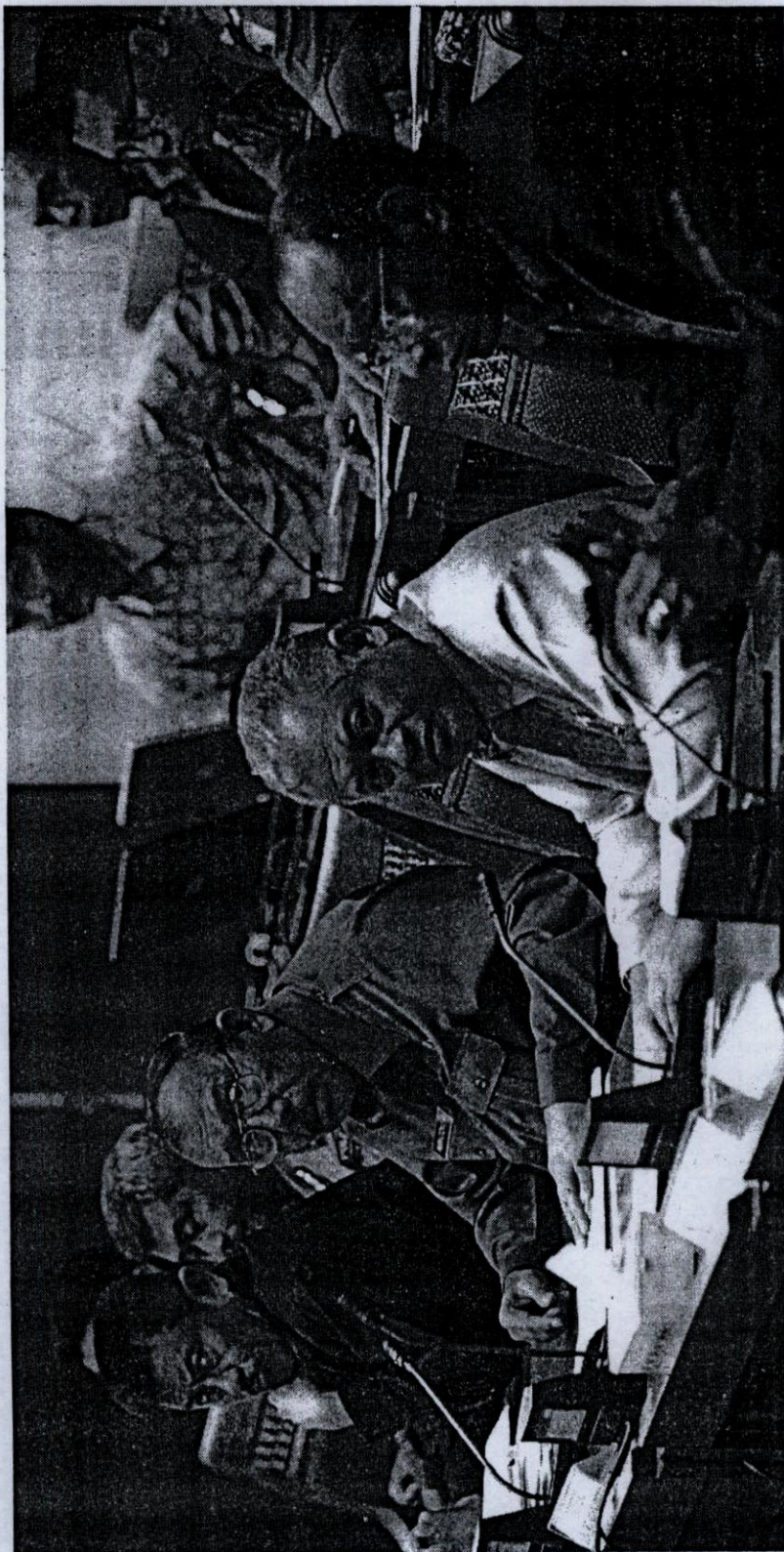
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2006



RELOKASI: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro (kedua dari kanan) dan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo (ketiga dari kanan) bersama Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VII DPR, kemarin. Gubernur Jawa Timur mendesak agar empat infrastruktur penting di sekitar semburan lumpur panas di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, segera direlokasi.

SINDO/ATMAN SURATMAN

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 36

TAHUN 2006

Lelet ketika Waktu Berbagi Tiba

Pemda Siak ingin mengurangi saham Pertamina di Blok CPP

Kerja sama pengelolaan blok CPP di Riau mulai retak. Bumi Siak Pusako menuntut Pertamina agar segera membentuk perusahaan patungan. Pertamina agak lamban menghadapinya. Soalnya, itu berarti sahamnya bakal berkurang.

Sigit Rahardjo, Marga Raharja,
Umar Idris, Ulin Ni'am Yusron

Laksana ledeng di rumah, setiap kita memutar keran, air pun mengucur. Itulah kucuran rezeki dari minyak yang mengguyur di Riau, sebuah provinsi kaya minyak. Demikian pula rezeki salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak, Riau, yang bernama PT Bumi Siak Pusako. Perusahaan ini bersama Pertamina membentuk sebuah Badan Operasi Bersama (BOB). Dan jangan remehkan si BOB ini, karena ia mengelola Blok Coastal Plains of Pakanbaru (Blok CPP) di Pakanbaru, Riau, yang masih rajin menyemburkan minyak.

Belum lupa kan, CPP dulu adalah bekas milik PT Chevron Pasific Indonesia (CPI)—dulu bernama Caltex. Pengelolaan blok ini berpindah tangan karena pemerintah tak lagi memperpanjang kontrak untuk CPI yang sudah beroperasi selama puluhan tahun di Riau. Itu sebabnya, jaringan infrastruktur untuk menyedot minyak di sana sudah terbangun rapi.

Tak pelak, tanpa perlu menggontorkan investasi besar BOB bisa langsung menikmati rezeki dari kucuran ladang minyak tersebut. Walau orang bilang ini sumur tua, saat ini Blok CPP masih bisa mengucurkan 28.000 barel minyak per hari. Volume itu kira-kira setara dengan 20% produksi minyak Pertamina saat ini. Nah, apa tak mirip air yang mengucur dari ledeng?

Dengan produksi minyak sebanyak itu Blok CPP yang membentang di empat kabupaten—Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan—bisa menambah kas daerah hingga US\$ 60 juta per tahun. Sebagian besar uang itu merembes ke kas daerah Kabupaten Siak. Maklum, sekitar 90% wilayah CPP berada dalam wilayah kabupaten tersebut. "Tahun lalu kami menerima Rp 800 miliar dari minyak," ujar Endang Sukarelawan, Wakil Ketua DPRD Siak. Tentu saja Pertamina juga menikmati hasil yang sama.

Pertamina enggan berubah

Orang bilang, kalau bicara soal harta, hubungan kekeluargaan bisa retas, bahkan putus. Agaknya demikian pula kerja sama antara Pertamina dan Siak Bumi Pusako. Kedua pihak itu kini tengah berselisih paham. Ujung pangkal perselisihan itu sebetulnya muncul sejak beberapa tahun silam.

Alkisah, menjelang masa kontrak Caltex habis pada 2001, Riau sempat bergolak. Sejumlah tokoh lokal lantang menyuarakan kemerdekaan. Alasannya, apalagi kalau bukan karena mereka menuduh pemerintah pusat terlalu menganggangi hasil emas hitam dari perut bumi Riau.

Pemerintah pusat yang gerah dengan tuntutan tersebut mengambil aksi dengan tidak memperpanjang kontrak Caltex. Presiden Abdulrahman Wahid bermaksud membagi harta karun ladang minyak itu kepada pemerintah daerah setempat. Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pun meminta Gubernur Riau membentuk tim untuk melakukan negosiasi dengan Pertamina. Oh, ya, asal tahu saja, ketika pemerintah tak memperpanjang kontrak Caltex, otomatis kendali atas CPP jatuh ke tangan Pertamina.

Singkat cerita, Pemkab Siak sebagai pemilik wilayah segera mendirikan PT Siak Bumi Pusako. BUMD itulah yang berunding dengan Pertamina. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan yang tertuang dalam *memorandum of understanding* (MoU) tertanggal 29 Desember 2001. Singkat kata, keduanya sepakat membentuk perusahaan Kontrak Production Sharing (KPS) dengan wilayah kerja CPP. Tak seperti lazimnya, KPS itu berbentuk Badan Operasi Bersama (BOB).

Dalam perkongsian itu, masing-masing pihak sepakat membagi *fifty-fifty* pendapatan bersih dari minyak, tentu saja setelah dipotong terlebih dulu dengan jatah 85% untuk pemerintah pusat. Mereka juga sepakat untuk membentuk sebuah perusahaan patungan setelah BOB berjalan selama dua tahun. Tentu perusahaan itu bakal berbentuk perusahaan terbatas (PT). Dalam perusahaan baru nanti, Siak Bumi Pusako akan memiliki mayoritas saham. "Perbandingannya yang diusulkan 55% Siak dan 45% Pertamina. Namun itu bisa berubah," ujar sumber KONTAN di BOB.

Harus kesepakatan *business to business*

Rupanya, Pertamina enggan berunding untuk pembentukan PT itu. Akibatnya, meski sudah telat lebih dari empat tahun, tak ada tanda-tanda Pertamina bersedia membentuk perusahaan baru tadi. "Bagi Pertamina, lebih menguntungkan mengerjakan sendiri CPP. Kerja sama dengan Siak melelahkan karena mereka tak tahu bisnis hulu," kata sumber KONTAN di BP Migas. Lagi pula, dulu meski Siak ti-

dak mendapatkan hak itu dengan gratis, Pertamina yang menjadi penolong. "Dana untuk saham Bumi Siak memang berasal dari APBD. Cuma, sebelum dana itu keluar, Pertamina yang menalangi dulu," kata sumber di BP Migas tadi.

Kini pemerintah dan rakyat Siak Bumi mulai gerah dengan sikap Pertamina. Menurut Endang, kontribusi Pertamina dalam BOB tidak besar. Ia juga meragukan kemampuan tenaga ahli Pertamina. "Tak ada *transfer of knowledge* di sini," timpalnya. Tak hanya menghendaki pembentukan PT, kini para wakil rakyat Siak mulai menyerukan tuntutan baru. "Kami ingin meninjau ulang kerja sama dengan Pertamina," tegas Endang.

Menurut mereka, akibat ketidakseriusan Pertamina, BOB kesulitan menemukan ladang-ladang minyak baru. Hingga kini mereka masih berkuat pada sumur-sumur minyak peninggalan CPI. Hanya beberapa sumur yang merupakan temuan mereka sendiri. Akibatnya pun jelas, BOB tak bisa mencapai target produksi sebanyak 40.000 barel per hari. Sampai hari ini produksi minyak dari sana hanya di kisaran 28.000 sampai 30.000 barel per hari saja. Sekadar catatan, saat CPI masih mengoperasikan CPP produksinya masih 80 ribu barel per hari.

Pertamina sejauh ini menyangkal cedera janji. "Pertamina mengikuti semua kesepakatan yang ada di situ," tukas Sukusen Soemarin-da, Direktur Hulu Pertamina. Soal penempatan tenaga ahli di BOB, misalnya, Pertamina menandatangani memang ada rotasi setiap tiga tahun sekali.

Demikian juga soal pembentukan perusahaan *joint venture*. "Kami sudah membicarakannya dalam *joint committee meeting* dengan Bumi Siak Pusako," katanya. Komite ini sudah bertemu secara rutin saban sebulan sekali. "Kami sering melakukan koordinasi, sambil mengontrol kinerja BOB," tambahnya.

Hanya, Pertamina memang belum memutuskan untuk segera mengurangi kepemilikan sahamnya di BOB. Walau masing-masing pihak mempunyai hak pertama untuk mendapatkan saham yang dilepas mitranya, Sukusen menandatangani bahwa kesepakatan itu harus bersifat *business to business*. Artinya, kalau pada saatnya nanti Pertamina mau melepas saham, mereka bisa menetapkan harga secara murni komersial.

Jadi, Siak sebaiknya mulai menyiapkan duit juga ya. Siapa tahu besok Pertamina langsung mengajak bikin perusahaan patungan. Otomatis, Siak kudu berani membayar saham Pertamina secara tunai dan tak bisa berharap dana talangan lagi. □

BP Migas ala Aceh

Setelah Undang-Undang (UU) Pemerintah Aceh disahkan April lalu, pemerintah pusat mesti konsekuen melaksanakannya. Pasal 160 ayat 1 dan 2 UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah Aceh membentuk badan pelaksana yang akan mengelola minyak dan gas bumi yang ada di darat dan laut. Dalam benak para petinggi Aceh, ketentuan di atas menjadi dasar sah untuk membentuk Badan Pelaksana (BP) Migas Aceh.

Nah, untuk mempercepat pembentukan BP Migas Aceh itu, 22 September lalu Pejabat Sementara Gubernur NAD telah membentuk tim yang bernama Tim Advokasi Migas Provinsi NAD. "Tim ini bertugas sebagai tim asistensi karena Aceh belum punya pengalaman dalam mengelola migas," jelas Surya Darma, Sekretaris Pelaksana Tim Advokasi Migas Aceh.

Salah satu tugas tim yang beranggotakan 24 orang itu adalah menyiapkan pembentukan Badan Pelaksana Pengelolaan Migas bersama Pemerintah Pusat. Di samping itu mereka juga harus menyusun pola pengelolaan migas Aceh bersama pemerintah pusat hingga membentuk BUMD Migas Aceh. BUMD itulah yang nantinya berperan

ala BP Migas.

Sayangnya semangat para pejabat di daerah tak diimbangi oleh pemerintah pusat. Menurut Teuku Riefky Harsya, anggota tim yang juga anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Demokrat, hingga kini pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM dan BP Migas, masih setengah hati mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Aceh. "Menurut Kepala BP Migas, pemerintah belum mengalihkan wewenang pembentukan BP Migas Aceh atau apa pun namanya," legas Riefky.

Abdul Muin, staf ahli BP Migas menandatangani keterangan itu. "Tak ada masalah soal pembagian hasilnya, tapi mengenai pengelolaan migas kita harus melihat kepentingan nasional," katanya.

Agaknya pemerintah pusat masih berpegangan pada UU Migas. Artinya, kewenangan soal migas ada di pemerintah pusat. Jelas, Surya Darma menolak pandangan ini. Menurutnya UU Pemerintah Aceh adalah *lex specialis*, yang penerapannya harus didahulukan daripada UU yang lain.

Wah, setelah berdamai, tiba juga saatnya untuk membicarakan rezeki. □